

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERAN HIZBUT TAHRIR DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN

DI KOTA MAKASSAR



OLEH :

WAHYUNI, S.Sos, M.Si

NIP 19701013 199903 2 001

DIBIAYAI OLEH :

DIPA APBN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2012

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN TAHUN 2012

1. A. Judul Penelitian : Peran Hizbut Tahrir Dalam
Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar
B. Kategori Penelitian : Pengembangan
2. Ketua Peneliti/Peneliti
A. Nama Lengkap dan Gelar : Wahyuni, S.Sos, M.Si
B. Jenis Kelamin : Perempuan
C. Pangkat/Gol/Nip : Penata Tk.I/III/d/19701013 199903 2 001
D. Jabatan Fungsional : Lektor
E. Jabatan Struktural : -
F. Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Perbandingan Agama
G. Mata Kuliah yang diampuh : Sosiologi
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Kota Makassar
5. Kerjasama dengan instansi lain : -
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang diperlukan :
A. Sumber dari Depag : Rp.
B. Sumber lain, sebutkan : Rp.
Jumlah :

Mengetahui :

KETUA LEMBAGA PENELITIAN

PENELITI

H.ABD.RASYID MASRI, S.Ag,M.Pd,M.Si
NIP. 19690827 19903 1 004

Wahyuni, S.Sos, M.Si
NIP.19701013 199903 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti persembahkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, peneliti menyampaikan yang penghargaan dan ucapan terima kasih, khususnya kepada Prof. Dr. H. Qadi Gassing, MA, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan motivasi kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sama peneliti sampaikan kepada Bapak H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, selaku kepala pusat penelitian UIN Alauddin Makassar yang dengan segala kearifan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Demikian pula staf dan karyawan Pusat Penelitian UIN Alauddin Makassar yang transparan memberikan informasi tentang penelitian.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para aktivis Hizbut Tahrir Makassar dengan kerelaan hati telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian. Tak lupa kepada masyarakat yang menjadi responden di empat kecamatan lokasi penelitian, peneliti mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga.

Semoga segala motivasi, masukan dan bantuan serta budi baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Kami memiliki harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi upaya perubahan masyarakat kearah yang lebih baik. Juga diharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Jazakumullahu khairan katsira

Makassar, 17 September 2012

Peneliti

Wahyuni, S. Sos, M.Si

Nip 19701013 199903 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
KATA SAMBUTAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
BAB. I. Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB. II. Tinjauan Pustaka.....	12
A. Hizbut Tahrir : Asal Mula dan Ideologinya.....	12
B. Visi dan Misi Hizbut Tahrir.....	17
C. Perekrutan dan Pengkaderan Anggota.....	19
D. Perubahan Masyarakat Sebagai Fakta.....	21
E. Landasan Teori/Konsep.....	31
BAB. III. Gambaran Umum Kota Makassar.....	33
A. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk.....	33
B. Keadaan Sosial Budaya dan Agama.....	36
BAB. IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
A. Karakteristik dan Pengetahuan Responden Tentang Hizbut Tahrir.....	40
B. Peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar.....	58
C. Tantangan yang Dihadapi Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan.....	71
BAB. V. Penutup.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	75
Kepustakaan.....	76

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Distribusi luas wilayah, jumlah kelurahan dan luas wilayah Menurut kecamatan di Kota Makassar tahun 2012.....	41
2. Distribusi responden menurut kelompok umur.....	41
3. Distribusi responden menurut tingkat pendidikan.....	43
4. Distribusi responden menurut jenis kelamin.....	43
5. Distribusi responden menurut pekerjaannya.....	44
6. Distribusi responden menurut pengetahuannya tentang Hizbut Tahrir.....	47
7. Distribusi responden menurut pengetahuannya tentang tujuan Hizbut Tahrir.....	47
8. Distribusi responden menurut pengetahuannya tentang Daulah Khilafah.....	47
9. Distribusi responden menurut ketertarikannya terhadap Hizbut Tahrir.....	48
10. Distribusi responden menurut persetujuannya terhadap gerakan-gerakan Hizbut Tahrir.....	48
11. Distribusi responden berdasarkan keterlibatannya terhadap kegiatan Hizbut Tahrir.....	50
12. Distribusi responden tentang peran Hizbut Tahrir di masyarakat.....	52
13. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang dakwah.....	53
14. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang politik.....	54
15. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam Bidang sosial.....	55
16. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang pendidikan.....	56
17. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang ekonomi.....	57
18. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang budaya.....	59
19. Distribusi pendapat responden tentang perubahan yang dilakukan Oleh Hizbut Tahrir di kota Makassar.....	65
20. Distribusi pendapat responden tentang peran Hizbut Tahrir dalam Perubahan sosial keagamaan di Kota Makassar.....	66
21. Distribusi pendapat responden tentang aspek perubahan yang dilakukan Hizbut Tahrir di kota Makassar.....	67
22. Distribusi pendapat responden tentang keberhasilan Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar.....	68
23. Distribusi pendapat responden tentang khilafah sebagai model terbaik Untuk perubahan sosial.....	69
24. Distribusi pendapat responden tentang pengaruh sosialisasi khilafah.....	70
25. Distribusi pendapat responden tentang kepedulian umat Islam terhadap Upaya perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di kota Makassar.....	71

ABSTRAK

Wahyuni, “Peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar”

Penelitian ini didasari oleh dua masalah (1) Apa peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar ? (2) Bagaimana tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir dalam upaya melakukan perubahan sosial keagamaan di kota Makassar ?

Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan tujuan penelitian (1) Untuk mengetahui peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar (2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar.

Untuk meneliti peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di kota Makassar digunakan teknik pengumpulan data berupa : (1) wawancara mendalam atau *indepth interview* terhadap aktivis Hizbut Tahrir (2) wawancara bebas terhadap masyarakat umum yang menjadi informan/responden (3) observasi partisipasi atau pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan berperan dalam kegiatan tersebut (4) kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel penelitian sejumlah 125 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hizbut Tahrir melakukan upaya perubahan sosial keagamaan di kota Makassar. Arah perubahan yang ditargetkan adalah perubahan sistem yang berlaku sekarang menjadi sistem yang didasarkan pada syariah Islam dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang adalah berusaha mengubah pemikiran masyarakat sesuai dengan syariah Islam (pemikiran Islam) dan kesadaran bahwa kondisi kehidupan masyarakat saat ini tidak diatur dengan sistem Islam. Aspek-aspek perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir meliputi bidang dakwah, politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan budaya. Terjadinya perubahan pada semua aspek tersebut tergantung pada berubahnya sistem. (2) ada dua tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir yaitu internal yang berasal dari kalangan intern umat Islam dan eksternal yang berasal dari kalangan di luar Islam yang tidak mau melihat kejayaan umat Islam bila bersatu di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Berdasarkan hasil penelitian itu, diajukan saran : (1) Diharapkan dukungan dan keseriusan umat Islam dalam melakukan upaya-upaya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan pada syariah Islam (2) Diharapkan oleh Hizbut Tahrir untuk merubah sistem yang berlaku di dalam masyarakat, maka Hizbut Tahrir harus melakukan sosialisasi dan interaksi kepada semua elemen masyarakat mulai dari level teratas sampai yang terendah (3) Untuk pencapaian tujuan itu juga, maka aktivis Hizbut Tahrir perlu menambah ilmu lebih banyak lagi, baik melalui halaqah yang dilakukan secara intern maupun di luar kalangan sendiri. Sehingga wawasan dan pemahaman tentang bagaimana kalangan di luar mereka dapat bertambah (4) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan kepustakaan bagi akademisi, peneliti, pemerhati dan siapa saja yang peduli terhadap persoalan perubahan sosial keagamaan di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan pembangunan pada mulanya sederhana saja, yakni memberantas kemiskinan dan menjembatani kesenjangan. Ketika dekade pembangunan dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera setelah perang dunia ke dua. Masalah yang dihadapi saat itu adalah kehancuran ekonomi dan prasarana dari negara-negara yang kalah atau menjadi korban peperangan. Oleh karena itu, perhatian utama pembangunan ditekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana-sarana ekonomi. Sasarannya adalah mengatasi penderitaan penduduk akibat kemiskinan dan ketidakadilan.

Karena akar masalah dari kemiskinan dan kesenjangan terletak pada masalah kemakmuran dan keadilan, maka selain berdimensi ekonomi, akhirnya pembangunan pun berdimensi sosial. Penderitaan dan kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tetapi juga oleh persoalan kesempatan kerja dan pengembangan diri, akses pada informasi, serta peluang untuk turut serta mengambil bagian dalam proses kemasyarakatan dan bahkan kehidupan kenegaraan.¹

Dengan demikian, dalam konteks ini, kegiatan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan menjembatani kesenjangan, tetapi juga secara lebih luas diorientasikan bagi perubahan-perubahan masyarakat pada umumnya ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu dari perubahan orientasi ini, pembangunan pada masa selanjutnya sering diartikan sebagai seperangkat kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran guna meraih perubahan-perubahan di masyarakat dalam segala seginya sesuai dengan keinginan pelaku pembangunan, seperti ditegaskan oleh Jack Lyle² yang menyatakan bahwa pembangunan tidak lain adalah suatu program yang berencana bagi perubahan yang sengaja diadakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan keterlibatan banyak pihak, khususnya segenap komponen kekuatan utama masyarakat yang ada dalam suatu bangsa, para politisi, kaum birokrat, ekonom, teknokrat, budayawan, para pendidik, juga

¹Soejipto Wirosardjono, Agama dan Pembangunan, dalam M.Mashur Amin (Ed), Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-Agama di Indonesia, (Yogyakarta : LKPSM-NU, 1989), h. 8

² Lihat Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, (Bandung : CV Remaja Karya, 1988), h. 106

kelompok sosial keagamaan dan pemimpin agama. Membahas peranan kelompok tersebut dalam kegiatan perubahan sosial di masyarakat memang sangat menarik, bukan saja lantaran para pemimpin agama merupakan komponen itu sendiri, melainkan juga karena pada umumnya perubahan diorientasikan pada upaya-upaya manusia yang bersifat utuh dan serasi antara kemajuan aspek lahiriah dan kepuasan aspek batiniah. Corak pembangunan dan perubahan masyarakat seperti ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan manusia yang akan di ubah pada dasarnya terdiri atas unsur jasmani dan unsur ruhaniah. Kedua unsur itu tentu harus terisi dalam proses pembangunan. Kekosongan pada salah satu unsur berarti hilangnya keseimbangan pada diri manusia, sama artinya dengan tidak tercapainya keutuhan dalam pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Kelompok sosial dan keagamaan bukan merupakan elemen yang pasif dalam proses sosial. Sebaliknya adalah elemen aktif dalam membentuk atau memberikan arah bagi proses sosial. Dengan kata lain kelompok keagamaan bisa memainkan peran yang amat penting bagi terbentuknya dan konsolidasi sebuah struktur baru. Bahkan lebih dari itu, dalam sejarah politik telah dibuktikan bagaimana kelompok ini dapat menjadi elemen pemacu yang amat efektif untuk menggerakkan perubahan politik bahkan sebuah revolusi dengan gerakan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran agama. Di dalam agama terdapat apa yang lazim di sebut *religious imagery*, atau suatu gambaran masa depan tentang kehidupan masyarakat yang didalamnya kelak tercipta suatu kesejahteraan. Agama menawarkan simbol-simbol yang mendorong lahirnya sebuah konseptualisasi struktur sosial dan sistem sosial masa depan, di samping memberi arahan tentang kiat yang dilakukan untuk mewujudkannya. Agama memang mengandung ide-ide yang potensial untuk memacu terjadinya perubahan, tetapi mengapa tidak muncul ke permukaan bahkan seringkali hanya berhenti dalam diskusi. Satu hal yang selama ini diyakini oleh banyak pakar adalah bahwa ide-ide tersebut memang tidak langsung mempengaruhi perubahan sosial. Ide-ide tersebut tidak begitu saja berkorelasi dengan perubahan sosial. Agar terwujud menjadi kenyataan dibutuhkan elemen-elemen sosial baik yang bersifat kultural maupun struktural.

Tantangan sebenarnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk hubungan sosial yang dikembangkan oleh para pemeluk agama serta pada nilai atau kandungan doktrin agama yang menjadi pilihan para elit agama untuk disampaikan kepada masyarakat. Sepanjang bentuk-bentuk hubungan sosial masih melembagakan kolektivisme yang berlebihan dan tetap di kungkung oleh patrimonialisme, dapat diperkirakan bahwa doktrin agama hanya akan mendukung status quo. Jadi, kelompok sosial manakah yang diharapkan menjadi agen perubahan ?. Salah satu kelompok yang amat potensial adalah kelompok cendekiawan dan agamawan. Di dalam kelompok ini, tidak hanya terendap pikiran yang kritis dan obyektif dalam membaca keadaan, melainkan juga terdapat orientasi ke depan. Orientasi ke depan sangat penting karena dengan itu, hal-hal yang potensial melahirkan dampak negatif dari suatu kegiatan dapat diantisipasi sejak dini.

Tetapi masalahnya sekarang adalah sistem pembangunan nasional negara kita ditandai oleh model yang sentralistik dan mengikuti jalur birokratis. Pembangunan lebih didominasi oleh keinginan dan kepentingan pemerintah dengan model pembangunan yang *top down*. Apa yang dipikirkan masyarakat tidak lebih dari sekedar input bagi para perencana karena mereka sebenarnya telah mempunyai prioritas programnya sendiri. Kritik dan saran hanya akan di terima selama tidak mengganggu kepentingan pemerintah.

Oleh karena itu, cendekiawan maupun tokoh-tokoh agama di masyarakat tidak lebih dari sekedar sebagai pemberi legitimasi kepada kebijakan yang telah dicanangkan, bukan untuk memperdebatkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Apabila betul demikian halnya, maka persoalan memang makin menjadi kompleks. Strategi-strategi yang selama ini dikembangkan oleh berbagai organisasi keagamaan harus terus disegarkan agar tidak kehilangan relevansi pada zaman yang telah berubah dengan cepat seperti sekarang ini. Organisasi social keagamaan yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Hizbut Tahrir dan lain-lain, mempunyai cendekiawan dan agamawan yang cukup banyak dan berasal dari berbagai disiplin ilmu, tinggal bagaimana membangun jaringan komunikasi yang intensif sehingga mempunyai alur pemikiran yang sama dalam menempatkan ajaran Islam sebagai kekuatan yang dapat memacu perubahan.

Pentingnya keterlibatan organisasi keagamaan seperti Hizbut Tahrir dalam kegiatan perubahan sosial masyarakat dan pembangunan adalah dalam aspek pembangunan ruhaniahnya, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan mereka saat ini dan kebenaran Islam sebagai landasan dan solusi dalam kehidupan. Dengan demikian keterlibatannya tidak bersifat suplemen (pelengkap penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses perubahan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bahkan para pemimpin dari organisasi keagamaan dapat berperan lebih luas, bukan hanya terbatas pada proses perubahan sosial dan pembangunan masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai motivator, pembimbing dan pemberi landasan etika dan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan perubahan sosial masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apa peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar ?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir dalam upaya melakukan perubahan sosial keagamaan di kota Makassar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir dalam upaya melakukan perubahan sosial keagamaan di kota Makassar

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat minimal pada dua aspek yaitu pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan aspek praktis.

1. Pada aspek pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep perubahan sosial khususnya yang terkait dengan peran yang dilakukan oleh kelompok keagamaan dalam proses perubahan tersebut.
2. Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberi wawasan kepada masyarakat dalam memahami dinamika sosialnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini di pilih dengan pertimbangan bahwa kota Makassar adalah kota pelajar di mana banyak di antara mereka yang tertarik menjadi anggota Hizbut Tahrir berasal dari kalangan pelajar terutama mahasiswa. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan tujuan menggambarkan peran Hizbut Tahrir sebagai motivator dalam perubahan sosial keagamaan. Penggambaran dilakukan secara sistematis dari suatu fakta secara faktual dan cermat, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail dan mempertahankan keutuhan obyek pengamatan dalam arti data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi (Muhadjir, 1990). Dalam penelitian ini menggunakan gabungan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif sebagai analisis utama (*qualitative dominant*) dan analisis kuantitatif sebagai pendukung. Analisis kuantitatif berposisi sebagai pendukung karena hanya digunakan pada satu uraian spesifik, dan dalam uraian tersebut digabungkan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode

kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang peran yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam proses perubahan sosial keagamaan yang terjadi di masyarakat kota Makassar, terutama dalam aspek perubahan nilai-nilai sosial, perilaku beragama, dan gerakan-gerakan sosial.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Makassar yang beragama Islam sebagai populasi sampling, dengan berbagai profesi, etnis dan daerah. Serta berbagai pihak yang memahami masalah ini. Sebagai populasi sasaran adalah semua tempat konsentrasi masyarakat dalam melakukan aktivitas yang memungkinkan dapat terpengaruh oleh perubahan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Sampel penelitian di tarik secara *kuota sampling* dengan keterwakilan dari kecamatan yang ada di pusat pelayanan masyarakat yaitu kecamatan Makassar, kecamatan yang mewakili pusat kota yaitu Rappocini dan wilayah pinggiran yaitu kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Biringkanaya. Untuk responden di tarik 125 orang responden dengan berbagai kegiatan seperti anggota majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat dan remaja. Untuk mengumpulkan data kualitatif, penentuan/penarikan sampel dilakukan secara *non-probability sampling* dengan teknik *snowbowling* yang bertujuan untuk mendapatkan variasi informasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika sebelumnya sudah di jaring dan di analisis. Setiap satuan berikutnya dapat di pilih untuk memperluas informasi yang telah di peroleh terlebih dahulu sehingga dapat mempertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dibedakan atas data primer dan data sekunder. Mencakup data-data tentang proses dan frekuensi perubahan serta data-data tentang makna dari adanya perubahan sosial keagamaan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), wawancara bebas dan observasi partisipasi (*participant observer*). Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui bahan pustaka baik berupa literatur-literatur, jurnal, bulletin

dan dokumen-dokumen serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*), digunakan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari informan dan informan kunci dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati subyek penelitian mengenai peran yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar.
- b. Wawancara bebas dengan masyarakat yang lain, yang dijumpai di beberapa tempat dan kesempatan, dengan model pembicaraan yang tidak terstruktur. Namun demikian wawancara bebas ini terkesan seperti pembicaraan biasa tanpa terganggu dengan kegiatan pencatatan dan perekaman.
- c. Observasi atau teknik pengamatan, untuk mengamati secara langsung perilaku informan dalam kesehariannya. Di samping itu peneliti juga melakukan observasi partisipasi dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir seperti seminar, diskusi publik, dialog, dan masirah.
- d. Kuisisioner digunakan dengan mengajukan pertanyaan kepada setiap responden dengan berdasar pada butir pertanyaan dalam kuisisioner.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data melalui proses inklusi dan eksklusi. Proses inklusi yakni mengambil data yang relevan dengan penelitian sedangkan proses eksklusi adalah membuang data yang tidak relevan. Selanjutnya setelah memilih data yang relevan dilanjutkan dengan mencari makna (*meaning*). Pemberian makna yang merupakan upaya yang lebih jauh dari penafsiran. Data yang diperoleh dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tentang Hizbut Tahrir : Asal Mula dan Ideologinya

Hizbut Tahrir didirikan di Yerusalem Timur pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani lahir pada tahun 1909 di Ijzim, sebuah desa yang terletak di distrik Haifa, Palestina. Ia masih keturunan Bani Nabhan, yaitu suku tua Arab yang mendiami bagian utara Palestina. Ayahnya bernama Ibrahim, seorang ahli hukum Islam. Ibunya adalah anak Syaikh Yusuf Al-Nabhani, seorang ulama, penyair, sarjana dan hakim pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Melalui kakeknya inilah Taqiyuddin banyak mengetahui sistem politik yang diterapkan pada masa pemerintahan Turki Utsmani.

Taqiyuddin An-Nabhani di kenal sebagai seorang pakar hukum Islam dan aktivis politik. Ia belajar hukum Islam di Universita Al-Azhar Kairo, dan setelah itu bekerja sebagai guru madrasah, kepala juru tulis, lalu hakim di pengadilan agama di Palestina.³ Pada tahun 1951, Taqiyuddin mengundurkan diri dari semua jabatan formal yang ia duduki dan merantau ke Yordan. Beberapa penulis mengatakan ia adalah simpatisan, jika bukan anggota dari Ikhwanul Muslimin, gerakan Islamis di Mesir yang didirikan tahun 1928. Kemungkinan besar ia berinteraksi dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin ketika menempuh pendidikan di Mesir, sebab pengaruhnya dapat di lihat dalam pemikiran agama dan politiknya, khususnya tentang ide kesempurnaan Islam serta Islam sebagai solusi dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, apakah itu politik, sosial, atau budaya.

Semasa hidupnya Taqiyuddin telah berkeliling dari Palestina, Yordan, Mesir Syria dan Libanon. Ia telah meninggalkan catatan sejarah yang sangat penting dalam perjalanan gerakan Islam di dunia, yakni dengan mendirikan Hizbut Tahrir. Pembentukan Hizbut Tahrir tampaknya sebagai respon An-Nabhani terhadap kolonialisme barat yang

³ Suha Taji-farouki, *A Fundamental Quest : Hizb al-Tahrir an The Search For The Islamic Caliphate* (London : Grey Seal, 1996), h. 1-2. Lihat juga International Crisis Group, *“Radical Islam In Central Asia : Responding to the Threat Of Hizbut Tahrir”*, (ICG Asia Report no.58, 30 Juni 2003), h. 2

mengakibatkan jatuhnya kekhilafan Islam, pendudukan Palestina serta terpecahnya negara-negara muslim Arab ke dalam sejumlah negara bangsa. Oleh karena itu perhatian utamanya adalah menyatukan negara muslim Arab di bawah satu pemerintahan Khilafah.⁴ Hizbut Tahrir lahir didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi kaum muslimin di berbagai belahan dunia, karena hampir di setiap tempat baik sebagai minoritas maupun mayoritas kaum muslimin cenderung tersisihkan dan dalam kondisi sosial ekonomi yang terkalahkan. Sering menjadi korban arogansi dari kaum yang mayoritas seperti di Perancis ada pelarangan mengenakan jilbab, pengekangan kaum muslimin minoritas seperti di Myanmar. Bahkan di negara-negara mayoritas muslim seperti di Libiya dan Mesir, penguasanya tidak memihak pada rakyat dan cenderung tidak memberi tempat kepada kaum muslimin untuk mengaktualisasikan keyakinannya dengan baik. Selain itu, potret global kemiskinan mayoritas terjadi di dunia Islam.

Berawal dari kondisi ini Hizbut Tahrir lahir. Keprihatinan terhadap kehidupan umat Islam dan didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya ” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebajikan yang menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”, maka Hizbut Tahrir berdiri dalam konteks memenuhi seruan Allah SWT, jadi dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar ini dijadikan Hizbut Tahrir sebagai landasan ideologis dalam melakukan gerakan-gerakannya.

Dalam beberapa karyanya, An-Nabhani menunjukkan keinginannya untuk membebaskan negara-negara muslim dari cengkeraman imperialisme barat dalam segala bentuknya. Perlu di catat bahwa reaksi An-Nabhani terhadap barat lebih radikal daripada Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, sebab ia membuat dikotomi antara Islam dan peradaban barat. Dalam hal ini, An-Nabhani memandang Islam sebagai prinsip yang serba lengkap (*self-sufficient*), ideologi modern yang komprehensif dan menyeluruh, dan superior terhadap ideologi-ideologi yang bersumber dari barat.⁵

Setelah Taqiyuddin An-Nabhani meninggal di Beirut pada tanggal 20 Desember 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir selanjutnya di pegang oleh Abdul Qadim Zullum. Pada masa kepemimpinan Zullum Hizbut Tahrir semakin berkembang dan kader-

⁴ Ibid, h .4

⁵ Taji-Farouki, *A Fundamental Quest*, h. 37

kadernya telah menyebar ke seluruh dunia. Markas Hizbut Tahrir pun dipindahkan ke London dan hidup secara rahasia di sana. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur tengah dan Afrika., seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga telah berkembang di Eropa, seperti Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, hingga ke Australia.

Hizbut Tahrir bertujuan membangun kehidupan Islam dimana seluruh kegiatan diatur sesuai dengan hukum Allah SWT, di bawah naungan Daulah Islamiyah. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasan yang pernah dicapai pada masa lampau, di mana umat Islam akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia. Negara khilafah akan kembali menjadi negara yang memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ideologi, pemikiran dan hukum yang ditawarkan Hizbut Tahrir telah di himpun oleh berbagai buku, antara lain Nizhamul Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam), Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Dalam Islam), Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Dalam Islam), Nizhamul Ijtima'iy fil Islam (Sistem Pergaulan Dalam Islam), At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik), Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-Pokok Pikiran Hizbut Tahrir, Daulatul Islamiyah (Negara Islam), Syakhshiyah Islamiyah (Membentuk Kepribadian Islamiyah) 3 jilid, dan masih banyak buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya yang telah diterbitkan oleh Hizbut Tahrir.

Kelompok ini tidak terlibat dalam pemilihan umum, sebab secara eksplisit menolak demokrasi. Hizbut Tahrir (HT) melihat demokrasi sebagai sistem kufur, yang bertentangan secara diametris dengan Islam. Bagi Hizbut Tahrir, Islam hanya mengenal Tuhan sebagai pembuat hukum, bukan manusia yang memiliki keterbatasan. Karena itu Hizbut Tahrir menganggap haram hukumnya bagi umat Islam mengadopsi demokrasi dan menyebarkannya.⁶ Untuk membangun sistem khilafah dalam Daulah Islamiyah, maka Hizbut Tahrir ingin membersihkan kehidupan umat dari segala pikiran, hukum, dan sistem yang merupakan produk barat terutama Amerika Serikat. Bagi Hizbut Tahrir, nasionalisme dan demokrasi harus diganti dengan sistem khilafah.

⁶ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi : Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya* (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1994), h.37

Sembari melawan ide pemisahan agama dan negara, Hizbut Tahrir memaknai politik sebagai segala upaya untuk perduli dan menjaga urusan masyarakat agar sesuai dengan hukum dan solusi Islam. Hal ini sejalan dengan dengan tujuannya, yaitu melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam pandangan Hizbut Tahrir hal ini berarti mengajak kaum muslimin melakukan perubahan untuk kembali hidup secara Islami, di Darul Islam serta di dalam masyarakat Islam di mana seluruh aktivitas kehidupan di atur sesuai dengan hukum-hukum syara, pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatian adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang di pimpin oleh seorang khalifah.⁷ Jadi, restorasi khilafah menurut Hizbut Tahrir adalah suatu keharusan untuk meraih kembali kejayaan Islam.

Untuk mengimplementasikan syariat, diperlukan sebuah sarana yaitu negara. Menurut Hizbut Tahrir, dalam ajaran Islam telah terdapat sebuah konsep negara yang di sebut Daulah Islamiyah.⁸ Negara ini secara *de facto* didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, di Madinah pada 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 23 September 622. Pasca Nabi Muhammad SAW, negara ini terus berlanjut dalam format negara Khilafah Islamiyah.⁹ Kepemimpinan Khilafah Islamiyah ini berlangsung terus dengan pasang surutnya, hingga 3 Maret 1924, yakni tatkala secara resmi khilafah yang berpusat di Istanbul Turki, dibubarkan. Meski periode khalifah yang baik dan buruk dating silih berganti, Negara khilafah secara *de facto* tetaplah negara yang diperhitungkan dunia selama 13 abad, dan pada saat itulah kaum muslimin juga diperhitungkan. Sistem pemerintahan Islam menganut sistem khilafah yang mengikuti pedoman Nabi (*Khilafah 'ala Minhaji al-Nubuwwah*).¹⁰

⁷ Ibid, h. 20

⁸ Dalam pandangan Hizbut Tahrir, Negara Islam terkadang di sebut dengan istilah al-Daulah al-Islamiyah atau darul Islam. Darul Islam sendiri menurut istilah syara' adalah suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanan wilayah tersebut di tangan Islam, yaitu di bawah kekuasaan pertahanan kaum muslimin, baik ancaman yang dating dari dalam negeri maupun luar negeri –sekalipun mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Hal ini dibedakan dengan Darul Kufur yaitu suatu wilayah yang menerapkan hukum-hukum kufur dan keamanannya tidak didasarkan pada Islam, yaitu tidak berada di tangan kekuasaan dan pertahanan kaum muslimin, sekalipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Lihat dalam Hizbut Tahrir, Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, terj. Nurkhalis, cet. Ke-3 (Bogor : Pustaka Tariqul Izzah, 2001), h.4

⁹ Lihat dalam artikel "Mengapa Harus Khilafah", dalam www.al-Islam.or.id

¹⁰ Gagasan tentang sistem khilafah adalah metode yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW, didasarkan pada pada sebuah hadis. Hadis secara lengkap dapat dilihat dalam Taqiyuddin al-Nabhany, al-Daulah al-Islamiyah (Beirut

Landasan utama dari negara khilafah adalah aqidah Islam. Ia menjadi dasar dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Serta pijakan untuk menjaga terjadinya keadilan dan menyelesaikan persengketaan. Karena itu, tidak dibolehkan negara khilafah itu menganut azas selain aqidah Islam.¹¹ Sebagai konsekuensi dijadikannya aqidah Islam sebagai azas, maka undang-undang dasarnya haruslah digali dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh negara antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan gerakan/*manuver* politik yang kekuatannya terletak pada penampakan kegiatan dan merahasiakan tujuan.
2. Mengungkapkan secara berani pelanggaran berbagai negara kufur, menjelaskan bahaya politiknya yang penuh kepalsuan, serta membongkar persekongkolan jahat dan menjatuhkan martabat dari pemimpin yang sesat.
3. Menampilkan keagungan pemikiran Islam dalam mengatur urusan individu, bangsa dan Negara di dunia yang merupakan metode politik yang paling penting.¹²

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka untuk memformalisasikan Islam dalam bentuk negara karena itu Hizbut Tahrir menjadi sebuah gerakan Islam radikal berbasis transnasional dengan orientasi politik yang unik. Berbeda dengan kelompok Islam lainnya. Hizbut Tahrir mengumumkan dirinya sebagai kelompok politik, bukan kelompok sosial, intelektual maupun spiritual.¹³ Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir bersifat politik. Hizbut Tahrir bermaksud memecahkan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat sesuai dengan hukum-hukum syar'i. Bagi Hizbut Tahrir, politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam.

: Darul Ummah, 2002), h.3. Terjemahan bebas dari hadis tersebut adalah : Akan ada kenabian pada kalian, jika Allah menghendaki, kemudian ia akan mengangkatnya (menghapusnya) jika dikehendaki. Lalu akan muncul kekhilafahan atas metode Nabi SAW dan akan mengangkatnya jika dikehendaki. Lalu akan muncul raja dan akan mengangkatnya jika dikehendaki. Dan akan muncul kembali khalifah yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW.

¹¹ Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, Menegakkan Khilafah, h.249

¹² Ibid, h. 294-297

¹³ Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir : Partai Politik Islam Ideologis (Pustaka Thariqul Izzah, 2000), h.1

Keterlibatan dalam aktivitas politik merupakan kewajiban kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Keterlibatan dalam politik bertujuan untuk melindungi kaum muslimin dari kerusakan akibat tindakan penguasa yang zalim dan musuh-musuh umat.¹⁵ Selain keterlibatan dalam aktivitas politik juga menjadi kewajiban setiap muslim adalah terlibat dalam perjuangan politik. Perjuangan politik adalah mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran dan mengoreksi penguasa. Mengabaikan perjuangan politik adalah suatu dosa, karena berarti mengabaikan suatu kewajiban. Perjuangan politik itu harus dimulai dalam diri umat.

B. Visi dan Misi Hizbut Tahrir

Visi dan misi global Hizbut Tahrir adalah menciptakan tauhidullah, menjadikan manusia hanya menyembah Allah semata dan melepaskan diri dari segala tahud yang ada di bumi untuk menyempurnakan keimanan dan mendirikan kekhalifahan. Visi ini akan terwujud manakala kaum muslimin bisa membangun sebuah tatanan politik global yaitu kekhalifahan, karena tanpa itu dalam analisis apapun terbukti tidak bisa walaupun banyak orang yang tidak percaya akan kekhalifahan, tapi mereka tidak bisa membuktikan dengan cara apa mewujudkan tauhidullah dan dan kemakmuran, dan kesejahteraan bagi umat muslim. Semua visi dan misi konteksnya global bagi jamaah kaum muslimin seluruh dunia.

Pembentukan khilafah yang sifatnya global merupakan penekanan utama dalam perjuangannya. Karena itu Hizbut Tahrir diidentifikasi sebagai group khilafist. Dalam pandangan pendiri Hizbut Tahrir, kekhalifahan Ottoman yang di hapus tahun 1924, merupakan bentuk otentik pemerintahan Islam yang memiliki basis historis dan basis doktrinal. Pengembalian khilafah adalah keharusan untuk menjamin penerapan syariah secara komprehensif. Bagi An-Nabhani, jika Daulah Islamiah didirikan di bawah kepemimpinan seorang khalifah maka akan memungkinkan untuk menyebarkan ide dan ajaran Islam ke seluruh dunia, mengembalikan umat ke masa keemasannya sebagai kekuatan dominan dan mempelopori misi membebaskan dunia dari cengkeraman hegemoni kapitalis. Pengangkatan khalifah adalah kewajiban bagi umat Islam.

¹⁴ Abdul Qadim Zullum, *Pemikiran Politik Islam*, terj. Abu Faiz (Bangil : al Izzah, 2004), h.104

¹⁵ *Ibid*, h.115

Hizbut Tahrir bersifat radikal dalam hal ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk mencapai tujuannya tanpa melalui kekerasan dan perlawanan fisik. Perjuangan fisik (peperangan) tidak diperkenankan, kecuali dalam satu kasus yaitu tampak kekufuran yang nyata atau dengan kata lain bila suatu negeri diperintah dengan hukum Islam (negara khilafah) tetapi penguasanya menerapkan hukum kufur atau kekufuran tampak di wilayah kaum muslimin sementara penguasa muslim tidak mencegahnya. Selain hal tersebut, perjuangan politik hanya dilakukan dengan verbal dan hal-hal lain yang dapat menunjukkan pertentangan, untuk menciptakan opini publik yang berlawanan untuk mempengaruhi dengan demikian untuk mengubah kesalahan dan kerusakan tersebut.¹⁶Bila dicermati uraian tersebut di atas maka model perjuangan Hizbut Tahrir meniru model dakwah Nabi Muhammad SAW.

Radikalisme Hizbut Tahrir tergambar dari perjuangannya yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui penghancuran total negara bangsa sekarang ini dan menggantinya dengan negara Islam baru di bawah satu komando khilafah. Dalam kaitan ini, Hizbut Tahrir menentang cara-cara gradual (*tadarruj*) sebab ini menunjukkan kelemahan dan ketidakpraktisan Islam. Dengan mengacu kepada pengalaman negara Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Hizbut Tahrir merumuskan tiga langkah perjuangan politik sebagai berikut :

1. Tahap *Tatsqif* (Pembinaan dan pengkaderan). Tahap ini untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.
2. Tahap *Tafa'ul* (interaksi), yaitu berinteraksi dengan umat agar mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.
3. Tahap *Istilamul Hukmi* (Pengambilalihan kekuasaan). Tahap ini berfungsi untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia.

Inilah tiga tahap perjuangan yang digunakan oleh Hizbut Tahrir untuk mengarahkan umat kepada pendirian negara Islam. Kaum muslimin harus meninggalkan

¹⁶ Ibid, h. 102

kekufuran dan mengambil jalan yang benar yaitu Islam, rakyat harus berubah karena dorongan kewajiban agama yaitu membebaskan kaum muslimin dari ketertindasan dan kezaliman. Ini mengisyaratkan bahwa perjuangan tersebut dimulai dari bawah dengan memakai *bottom up approach*. Karena itu bisa dipahami jika gerakan ini sangat aktif dalam hal perekrutan anggota, proses pengkaderan/pembinaan dan penyebaran ide melalui media cetak seperti al-Islam satu minggu sekali, majalah media umat, majalah al-wa'i dan melalui jaringan sosial, radio HTI, website, pamflet, seminar dan demonstrasi jalanan. Hizbut Tahrir juga mengadakan pembinaan rutin, pembinaan klasikal dan halaqah Islam peradaban. sebagai bagian untuk mewujudkan tahap kedua dan ketiga. Untuk konteks Indonesia, gerakan ini mulai masuk pada fase kedua dari perjuangan mereka.

C. Perekrutan dan pengkaderan Anggota

Hizbut Tahrir menerima anggota dari orang-orang yang memeluk Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memperhatikan keturunan, warna kulit, suku bangsa dan tidak membedakan mazhab yang di anut. Individu-individu yang dapat direkrut masuk ke dalam Hizbut Tahrir adalah mereka yang memiliki akidah Islam matang dalam *tsaqafah* Hizbut Tahrir, serta mengambil dan menerapkan ide-ide Hizbut Tahrir. Dia sendirilah yang mengikhlaskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir. Jadi ikatan di antara anggota Hizbut Tahrir adalah aqidah Islam dan *Tsaqafah* Hizbut Tahrir. Halaqah-halaqah (pembinaan) bagi wanita dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan halaqah laki-laki, yang memimpin halaqah wanita adalah para suami, mahramnya, atau para wanita.

Untuk menjadi kader Hizbut Tahrir, harus memiliki *fikrah* dan *thariqah* yang benar, yaitu pertama, meyakini Islam sebagai ideologi dan mengamalkannya dalam berbagai aspek kehidupan, kedua ; kedua, menjadikan aqidah Islam sebagai ikatan partai yang paling hakiki. Aqidah adalah ikatan antar individu dalam partai. Aqidah yang mendalam dan teguh serta *tsaqafah* partai yang matang wajib menjadi pengikat antara anggota partai ; ketiga, memiliki kesadaran untuk mendakwahkan atau menyerukan ideologi Islam ke berbagai penjuru dunia ; keempat, menjalankan segala *thariqah* secara benar sebagaimana yang telah digariskan oleh partai. Setiap langkah yang di tempuh selalu disesuaikan dengan *fikrah* dan *thariqah* partai ; kelima, menjadikan realitas

sebagai obyek pikiran untuk di ubah sesuai dengan ideologi. Tidak menjadikan realitas justru sebagai sumber pemikiran dengan mencocokkan ideologi dengan kenyataan. Karenanya, mereka harus berusaha mengubah, membentuk, serta menundukkan keadaan sesuai dengan ideologi yang digariskan oleh partai, bukan sebaliknya menyesuaikan ideology itu dengan keadaan ; keenam, memiliki kesabaran dan keuletan dalam mewujudkan misi partai.

Dalam mengubah masyarakat kearah yang diinginkan oleh partai, maka tidak dapat dihindari terjadinya benturan-benturan antara partai dengan keinginan masyarakat yang telah diracuni oleh pikiran-pikiran asing yang tidak menginginkan ideologi partai terwujud. Mereka lalu melakukan reaksi balik secara fisik maupun non fisik. Pada saat itulah dibutuhkan kader partai yang tangguh dan tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan.

Kader-kader yang telah memiliki fikrah dan thariqah di atas dapat dijadikan sebagai pimpinan partai yang di dalam keorganisasian Hizbut Tahrir di sebut halaqah pertama (sel utama). Halaqah pertama diibaratkan seperti motor, motor yang digerakkan gas, mempunyai energi panas yang dihasilkan dari percikan api busi dan bensin. Energi panas ini menghasilkan tenaga gas. Tekanan gas ini mendorong piston yang menggerakkan mesin dan menggerakkan seluruh peralatan mesin. Atas dasar ini, keberadaan busi, bensin, dan putaran mesin merupakan asal-usul pergerakan motor. Sebab dari ketiga hal itulah akan dihasilkan energi panas yang akan menimbulkan tekanan dan tekanan inilah yang akan menggerakkan bagian lain dari mesin dan menggerakkan motor. Apabila perputaran mesin berhenti, maka berhenti pulalah gerakan alat-alat yang lain. Dengan demikian, harus ada busi, bensin, dan gerakan motor agar dapat dihasilkan perputaran mesin dan pergerakan seluruh peralatan mesin.

Seperti itulah perumpamaan pimpinan partai (halaqah pertama). Fikrahnya bagaikan percikan api dari busi, perasaan para anggotanya yang penuh kesadaran bagaikan bensin, dan manusia yang perasaannya terpengaruh oleh fikrah adalah bagaikan gerakan motor.¹⁷ Dalam proses pengkaderan, tidak dibenarkan para kader hanya mengambil aspek ilmiah dari tsaqafah partai, yaitu belajar hanya untuk mendapatkan ilmu. Tsaqafah partai adalah untuk diamalkan dalam kenyataan hidup dan

¹⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, Mengenal Hizbut Tahrir, h. 44-45

untuk menyebarluaskan *qiyadah fikriyah* (panduan pemikiran) di tangan masyarakat. partai tidak boleh mendorong umat hanya untuk mengembangkan aspek ilmiah saja.

Hizbut Tahrir juga tidak menghendaki para kader partai mengambil sifat *uzlah* (mengasingkan diri dari masyarakat). Karena sifat *uzlah* itu merupakan gabungan dari sikap pengecut dan keputusasaan, yang harus di kikis habis dari kehidupan masyarakat.¹⁸ Karena itu kader partai harus berinteraksi dengan masyarakat. Berinteraksi dengan umat bukan berarti mengumpulkan umat di sekitar mereka, tetapi yang dimaksud adalah memahami umat akan ideologi partai supaya menjadi ideologi umat. Meskipun umat berbeda-beda sarana fisik dan tempat tinggalnya, sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, yang mempunyai perasaan, pemikiran dan ideologi yang satu. Karenanya, dalam berinteraksi dengan umat haruslah satu pendekatan, tak ada perbedaan antara masyarakat kota dan desa. Ketika internalisasi ideologi telah sempurna pada diri kader-kader partai dan masyarakat pun sudah merasakan kehadiran ideologi itu secara sempurna, berarti dakwah telah melewati *nuqthatul ibtida* (titik awal) dan dakwah harus berpindah ke *nuqthatul intilaq* (titik tolak dakwah).

D. Perubahan Masyarakat Sebagai Fakta

Setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tidak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Kehidupan masyarakat desa, dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah mengenal surat kabar, listrik dan televisi.¹⁹

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya. Dalam masyarakat maju atau pada

¹⁸ Ibid, h. 56-57

¹⁹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 162

masyarakat berkembang, perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, bahwa perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik.²⁰

Perubahan-perubahan pada saat ini nampak sangat cepat, sehingga semakin sulit untuk mengetahui bidang-bidang manakah yang akan berubah terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian secara umum, perubahan-perubahan itu biasanya bersifat berantai dan saling berhubungan antara satu unsur dengan unsur kemasyarakatan yang lainnya. Berdasarkan uraian ini, maka yang di maksud dengan perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain.

Dalam penelaahan mengenai perubahan-perubahan sosial yang relatif kompleks tersebut, sering para ahli mengalami kekaburan terutama tentang ruang lingkup, batasan pengertian dan aspek-aspek yang utama dalam perubahan tersebut. Untuk menghindari kesulitan, maka faktor utama yang paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah tentang batas pengertian dari perubahan sosial itu sendiri.

Beberapa defenisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Gillin dan Gillin, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
2. Samuel Koenig, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia.
3. Kingsley Davis, mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

²⁰ Ibid, h. 163

4. Bruce J. Cohen, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Misalnya perubahan dalam satu segi dari kehidupan sosial menunjukkan perubahan karena terjadi perubahan dalam struktur sosial dan organisasi sosial, yang merupakan syarat utama dalam perubahan itu adalah sistem sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.
5. Roucek dan Warren, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.
6. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
7. Soedjono Dirjosisworo, merumuskan defenisi perubahan sosial sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial dan organisasi sosial.²¹

Perubahan masyarakat dalam arti luas, diartikan sebagai perubahan/perkembangan dalam arti positif maupun negatif yang disebabkan oleh kemajuan teknik atau *technical change*. Tetapi karena setiap penemuan tehnik mempunyai akibat perubahan terhadap mental manusia maka penggunaannya dapat mengakibatkan perubahan di segala bidang dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengubah pendapat dan penilaian orang terhadap apa yang hingga saat penemuan tadi di anggap mutlak, tidak dapat berubah. Perubahan penilaian tadi terjadi karena *inner construction*²² dan falsafah manusia disangsikan, karena penemuan teknik serta penggunaannya meminta falsafah hidup yang baru dari manusia. Di mana perubahan konstruksi dalam manusia dan karenanya pada satuan-satuan sosial tentunya akan mempunyai akibat perubahan hubungan untuk waktu tertentu terganggu, yaitu karena

²¹ Soerjono Soekanto, Sosisologi Suatu Pengantar (Jakarta : CV. Rajawali, 2007), h. 335-336

²² Defenisi tentang Inner Construction diberikan oleh Karl Mannheim, seorang sosiolog terkemuka

setiap perubahan sikap pada suatu satuan sosial meminta perubahan pada satuan sosial lainnya yang berakibat pada perubahan seluruh pola masyarakat.

Dalam perubahan yang multikompleks ini, ada dua kemungkinan yaitu manusia menemukan nilai sosial dan pedoman hidup yang baru dan manusia tenggelam dalam persolan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil sikap terhadap keadaan baru tersebut. Akibat yang kedua inilah yang menyebabkan manusia mengalami frustrasi bahkan apati. Sebaliknya, keadaan di mana manusia berhasil menemukan nilai sosial dan falsafah hidup baru, mencerminkan keadaan manusia yang berhasil mengatasi krisis, yaitu berhasil mengambil keputusan.

Sementara itu, Lauer mengartikan perubahan sosial sebagai variasi yang berkelanjutan dalam hubungan antar individu, kelompok budaya dan masyarakat. Perubahan sosial menembus segala aspek kehidupan sosial secara terus menerus.²³ Dengan demikian perubahan sosial memiliki teba (*scope*) kejadian dari yang sederhana misalnya dalam lingkungan keluarga sampai pada kejadian yang paling lengkap mencakup tarikan kekuatan kelembagaan dalam masyarakat.

Kebanyakan defenisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang di maksud struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.²⁴ Moore memasukkan ke dalam defenisi perubahan sosial ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Dari segi fakta sosial, dapat digambarkan bahwa setiap masyarakat sepanjang hidupnya dapat dipastikan akan mengalami perubahan sosial. Cohen²⁵ dalam Horton mengemukakan bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi dalam struktur atau organisasi sosial masyarakat di sebut perubahan sosial. Perubahan itu akan berlangsung terus menerus dengan daya kecepatan yang tidak sama, sehingga ada masyarakat yang cepat ada pula yang lambat berubah.

Sementara itu, Lauer mengartikan perubahan sosial sebagai variasi yang berkelanjutan dalam hubungan antar individu, kelompok budaya dan masyarakat. Perubahan sosial menembus segala aspek kehidupan sosial secara terus menerus.²⁶

²³ Robert H.Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta : Gramedia, 1983), h. 21

²⁴ Moore A. Helen, Sosiologi Wanita, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h .37

²⁶ Op cit, h. 22

Dengan demikian perubahan sosial memiliki teba (*scope*) kejadian dari yang sederhana misalnya dalam lingkungan keluarga sampai pada kejadian yang paling lengkap mencakup tarikan kekuatan kelembagaan dalam masyarakat.

Kebanyakan defenisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang di maksud struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.²⁷ Moore memasukkan ke dalam defenisi perubahan sosial ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Dari segi fakta sosial, dapat digambarkan bahwa setiap masyarakat sepanjang hidupnya dapat dipastikan akan mengalami perubahan sosial. Cohen²⁸ dalam Horton mengemukakan bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi dalam struktur atau organisasi sosial masyarakat di sebut perubahan sosial. Perubahan itu akan berlangsung terus menerus dengan daya kecepatan yang tidak sama, sehingga ada masyarakat yang cepat ada pula yang lambat berubah.

Di dalam uraian di atas dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial terbagi dua yaitu :

1. Perubahan struktural yaitu perubahan yang terjadi dalam bidang posisi atau status, seperti : peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, arus komunikasi ;
2. Perubahan kultural yaitu perubahan yang terjadi dalam bidang nilai, norma dan kebiasaan, seperti perubahan akan sesuatu nilai yang dihargai.

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama di anggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Ada tiga faktor penyebab utama dalam perubahan sosial, yaitu penimbunan kebudayaan merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang penting. Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terjadi penimbunan, yaitu kebudayaan semakin beragam dan bertambah secara akumulatif. Bertimbunnya kebudayaan ini oleh karena adanya

²⁷ Moore A. Helen, op cit, h. 38

penemuan baru dari anggota masyarakat pada umumnya. Menurut Koentjaraningrat,²⁹ faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah kesadaran dari orang-perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya, kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, perangsang dari aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Penimbunan kebudayaan terjadi juga pada situasi masyarakat yang tergolong fanatik terhadap kebudayaan-kebudayaan lama, tidak mudah dihilangkan. Tetapi dengan adanya kebudayaan baru, maka terjadi benturan-benturan kebudayaan. Jika kebudayaan baru di anggap lebih besar fungsinya oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka kebudayaan lama akan ditinggalkan atau lebur menjadi satu dengan kebudayaan yang baru. Masyarakat perkotaan merupakan contoh perubahan yang relatif cepat, oleh karena masyarakat kota cenderung terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan baru. Tetapi pada masyarakat terpencil, biasanya cenderung sulit berubah atau paling tidak perubahannya lambat sekali.

Koentjaraningrat,³⁰ berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya inovasi. Proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke bagian-bagian lain dalam masyarakat, dan cara-cara unsure-unsur kebudayaan baru diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai dalam masyarakat bersangkutan. Penemuan baru dapat berupa benda-benda tertentu yang bersifat fisik, dapat pula bersifat non fisik seperti ide-ide baru, sistem hukum atau aliran-aliran kepercayaan yang baru. Ogburn dan Nimkoff menyebut penemuan baru sebagai *social invention* yaitu penciptaan pengelompokan dari individu-individu yang baru, maupun suatu perikelakuan sosial yang baru. Yang terpenting adalah, akibatnya terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang kemudian berpengaruh pada bidang-bidang kehidupan lainnya.

Perubahan jumlah penduduk juga merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti penambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah, dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

²⁹ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), h. 135

³⁰ Ibid, h. 136

Sementara pada daerah yang lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi. Ditinjau dari sudut pertambahan penduduk misalnya transmigrasi, jika berjalan secara ideal dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan, mungkin akan terjadi perubahan yang positif. Artinya dengan adanya pendatang baru yang terampil dan siap bekerja di tempat yang baru, maka besar kemungkinan justru tidak hanya sekedar menguntungkan bagi pihak transmigran belaka, melainkan juga dapat berpengaruh terhadap penduduk asli untuk ikut serta pula bekerja dengan pola yang menguntungkan sama dengan penduduk pendatang.

Kehidupan masyarakat akan berubah karena percampuran antara berbagai macam perilaku sosial dan kebudayaan, begitu juga ekonomi, politik dan keamanan. Sementara itu perubahan sosial yang disebabkan oleh berkurangnya penduduk mengakibatkan kekosongan pada daerah pemukiman yang lama. Jika tempat tersebut sebelumnya tandus, tidak cocok untuk lahan pertanian, kemudian selanjutnya di bangun fasilitas pasar atau peralihan pada bidang industri, maka terjadi perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pola pekerjaan, sistem ekonomi, kebudayaan dan seterusnya. Pada masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai latar belakang etnik yang berbeda yang bercampur baur dengan bebas dan mendifusikan adat, pengetahuan, teknologi dan ideologi, biasanya mengalami kadar perubahan yang pesat. Konflik budaya, *mores* dan ideologi selalu menghasilkan ketidaksesuaian dan juga keresahan sosial, dan memudahkan terjadinya perubahan sosial.

Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat. Masyarakat yang heterogen biasanya ditandai oleh kurang dekatnya hubungan antara orang yang satu dengan orang atau kelompok lainnya. Individu cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri. Sementara itu kondisi sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari, jika proses ini memuncak, maka pertentangan akan terjadi pada masyarakat bersangkutan. Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik, dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terhadap hal-hal yang baru. Contoh konkret tentang pengangguran sebagai akibat kurang tersedianya lapangan kerja, di samping karena rendahnya mutu pendidikan, pada saat

demikian para penganggur resah dan kecewa, padahal proses kehidupan tetap menuntut keras agar mereka tetap dapat hidup wajar.

Dalam keadaan demikian, apabila ada ide baru atau ada tawaran pekerjaan baru, maka biasanya tanpa pikir dua kali langsung di respon meskipun pekerjaan itu tidak terpuji seperti membunuh atau memberontak pada pemerintah misalnya. Hal ini akan menimbulkan pertentangan struktural dan lebih luas sifatnya, tidak hanya menyangkut pertentangan secara fisik, akan tetapi juga pertentangan nurani lantaran pesan kejujuran tidak lagi dapat membuktikan keampuhannya melawan kenyataan kehidupan ini.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan atas beberapa bentuk yaitu :

1. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi

Yang dimaksud dengan perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa perubahan sosial itu terjadi oleh karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Suatu masyarakat pada waktu tertentu bentuknya sangat sederhana, namun oleh karena masyarakat mengalami perkembangan, maka kemudian bentuk sederhana berubah menjadi bentuk yang kompleks. Tahapan perubahan itu biasanya berlangsung secara siklus dan berulang-ulang, sehingga sampai pada tahapan tertentu. Masyarakat berkembang melalui tahap-tahap yang didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap pertama dasarnya kepercayaan, tahap kedua dasarnya adalah indera manusia, dan pada tahap ke tiga dasarnya adalah kebenaran. Perubahan seperti ini cenderung menunjukkan proses yang bersifat evolusi.

Pada waktu muncul pola perilaku sosial baru dalam masyarakat, maka pertama kali yang terjadi adalah proses kepercayaan, di mana proses penerimaan masyarakat terhadap inovasi didasarkan pada kepercayaan terhadap manfaat yang mungkin dapat dicapai. Tahap berikutnya masyarakat mulai melihat realita sosial, jika perubahan-

perubahan itu pada umumnya lebih banyak memberikan keberuntungan atau berguna dalam rangka usaha untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidupnya, maka secara perlahan masyarakat akan menerima perkembangan masyarakat yang bersangkutan sebagai suatu kebenaran.

Berbeda halnya dengan perubahan yang bersifat revolusi, di mana perubahan berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan revolusi dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak sama sekali. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu sulit untuk dihindari, bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian menjelma menjadi tindakan revolusi.

Menurut Soerjono Soekanto, syarat-syarat terjadinya revolusi adalah sebagai berikut :

- a. Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- b. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang di anggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
- d. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat di lihat oleh masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu ideologi tersebut.
- e. Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila

momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang di pilih keliru, maka revolusi dapat gagal.

2. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-perubahan tersebut. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Suatu perubahan yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian atau pengawasan dari *agent of change* tersebut. Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu saja, melainkan bisa juga diarahkan pada perubahan-perubahan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan dalam tubuh masyarakat yang lain pula.

Perubahan yang direncanakan, paling baik dilakukan pada masyarakat yang memang sebelumnya sudah mempunyai keinginan untuk mengadakan perubahan, tetapi tidak mampu melakukannya. Dalam kondisi demikian, masyarakat akan serta-merta menerima perubahan yang dilakukan oleh *agent of change* yang dirasakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Akan lebih baik lagi apabila sebelum perencanaan dilaksanakan, *agent of change* terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap masyarakat sasaran perubahan untuk mengetahui kehendak dan harapan mereka, baru kemudian disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ada. Perubahan yang direncanakan, dengan terlebih dahulu mengetahui kehendak dan harapan masyarakat terhadap perubahan selanjutnya, dapat pula merupakan rencana perubahan terhadap hasil-hasil perubahan sebelumnya yang tidak menguntungkan pihak masyarakat.

Sementara itu perubahan yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. perubahan-

perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam Kondisi demikian anggota masyarakat pada umumnya lebih sulit diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan, lantaran kekecewaan mereka yang mendalam. Mungkin karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau mungkin karena masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang sangat kuat terhadap kesucian dan kemampuan lembaga-lembaga sosial atau tradisi-tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

E. Landasan Teori/Konsep

Pandangan perubahan sosial dari perspektif teori *structural fungsional* menurut Parsons, bahwa seluruh proses menimbulkan sejenis perubahan secara keseluruhan ada empat jenis proses yaitu : pertama proses keseimbangan mengacu pada proses yang membantu mempertahankan batas-batas sistem. Proses ini mungkin statis atau dinamis. Di dalam kedua jenis keseimbangan ini proses perubahan berlangsung terus, hanya saja dalam keseimbangan dinamis terdapat proses perubahan yang sudah terpola. Tentu saja ini tidak mencerminkan perubahan fundamental dari sistem tetapi hanya perubahan dalam kadar kognitif bagian kultural masyarakat yang bersangkutan. Jenis proses kedua adalah perubahan struktural yaitu perubahan dalam kultur normatif sistem sosial masyarakat. Terdapat saling ketergantungan unit-unit dalam satu sistem berarti bahwa perubahan fundamental dalam unit tertentu mungkin menimbulkan perubahan dalam unit lain, dan perubahan di tingkat tertentu sistem itu mungkin mempengaruhi sejenis perubahan di tingkat lain. Jenis proses ketiga adalah diferensiasi struktural. Proses ini menimbulkan perubahan di dalam sub sistem tetapi tidak mengubah struktur sosial secara keseluruhan. Dengan kata lain, nilai-nilai yang sudah mapan di anggap tetap tidak berubah. Akibat diferensiasi, kadar nilai berubah tetapi polanya tidak. Jenis keempat adalah evolusi masyarakat. Arah umum evolusi menuju kepada peningkatan kemampuan adaptasi.

Parsons menganalisis evolusi sosial menurut satu paradigma yang dimulai dengan proses diferensiasi. Dalam hal ini diferensiasi menimbulkan unit-unit baru yang berbeda, baik struktur maupun makna fungsionalnya bagi sistem yang lebih luas. Jika proses ini

benar-benar bersifat evolusi, maka unit-unit baru akan melaksanakan atau mempunyai kemampuan adaptasi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara lebih efektif di banding pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah dilaksanakan di dalam unit mula-mula. Parsons menyebutnya sebagai aspek peningkatan adaptasi sosial.

Struktur sosial itu bersifat abstrak tetapi keberadaannya selalu dirasakan langsung atau tidak langsung oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Karena itu pada dasarnya struktur sosial merupakan faktor pengaruh dan pengendali seluruh kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian fungsi dari kehidupan sosial merupakan suatu kontribusi yang merupakan aktivitas keseluruhan kehidupan sosial di dalam suatu sistem sosial yang terorganisasikan di dalam prinsip-prinsip internal seperti genetik. Jadi struktur sosial berupa prinsip-prinsip dasar yang mengakui adanya proses-proses dalam sistem sosial.

Dalam perspektif teori konflik, Dahrendorf³¹ melihat bahwa meski aspek-aspek sistem sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antara keduanya. Perubahan sosial merupakan wujud dari pada konflik kepentingan karena di dalam masyarakat, terdapat kelas-kelas yang memiliki kepentingan tertentu. Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan.

Hal yang berbeda di lihat dari perspektif ide. Menurut Sorokin³² sosiokultural merupakan lingkaran yang bervariasi antara ketiga supersistem yang mencerminkan kultur yang agak homogen. Kultur yang besar bukan sekedar tempat meloncat sejumlah besar fenomena kultural yang berbeda, melainkan sebuah kesatuan individualitas yang unsur-unsurnya dirembesi oleh prinsip sentral yang sama dan membentuk nilai-nilai dasar yang sama. Ketiga supersistem ini di sebut Sorokin sistem ideasional, sistem inderawi, dan sistem sistem campuran. Ketiga supersistem atau mentalitas budaya ini menunjukkan perbedaan dasar berpikir. Sistem ideasional diliputi oleh prinsip atau dasar berpikir yang menyatakan yang menyatakan Tuhan sebagai realitas tertinggi dan nilai terbenar. Dunia di pandang sebagai suatu ilusi, sementara dan tergantung pada alam transenden, atau sebagai aspek kenyataan yang tak sempurna dan tak lengkap.

³¹ Margaret Poloma, Teori Sosiologi Kontemporer, (Jakarta : CV.Rajawali, 1994), h. 137-138

³² Ibid h.139

Pada perspektif kelembagaan, menurut Hunt,³³ suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Proses pelebagaan adalah proses dimana suatu norma di kenal, diakui, dihargai dan ditaati yang mencakup penggantian perilaku spontan, perilaku yang diharapkan, dipolakan teratur dan dapat diramalkan. Sedangkan media kelembagaan adalah agama, keluarga, sekolah, ekonomi, kelompok-kelompok sosial dan keagamaan, partai politik, pengadilan dan polisi.

³³ Dalam Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1998), h. 66

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

A.Letak Geografis dan Keadaan Penduduk

1. Letak Geografis

Penelitian tentang Peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan dilaksanakan dengan mengambil lokasi di kota Makassar sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar, kadang dieja Macassar atau Mangkasar. Hari jadi kota Makassar adalah 9 November 1607. Dari tahun 1971 sampai 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang. Kotamadya ini adalah kota terbesar di propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara 5 8'6"19" – 4 09 lintang selatan dan 119 24'17"38" bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar

Jumlah penduduk kota Makassar saat ini adalah 1.339.374 jiwa yang mendiami wilayah administratif Kota Makassar dengan luas 175,77 Km², terbagi dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan, serta 941 RW, 4544 RT. Jumlah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea adalah dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 48,22 Km² Ha dan 31,84 Km². Kedua kecamatan tersebut merupakan 45,54 % dari seluruh wilayah kota Makassar. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Distribusi luas wilayah, jumlah kelurahan dan luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar tahun 2012

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KOTA
1	2	3	4	5
1	Mariso	9	1,82	1,04
2	Mamajang	13	2,25	1,28
3	Tamalate	10	20,21	12,07
4	Rappocini	10	9,23	5,25
5	Makassar	14	2,25	1,43
6	Ujung Pandang	10	2,63	1,50
7	Wajo	8	1,99	1,13
8	Bontoala	12	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	12	5,94	3,38
10	Tallo	15	5,83	3,32
11	Panakkukang	11	17,05	9,70
12	Manggala	6	24,14	13,73
13	Biringkanaya	7	48,22	27,43
14	Tamalanrea	6	31,84	18,11
	Jumlah	143	175,77	100 %

Sumber : Diolah dari Makassar dalam angka tahun 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa luas wilayah kecamatan tidak merata namun potensinya sangat besar, di mana setiap kecamatan mempunyai karakteristik masing-masing dan merupakan potensi pemerintahan kota dalam pelaksanaan pembangunan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km atau 27,43 % dari seluruh luas kota Makassar. Kecamatan terluas kedua adalah Tamalanrea dengan luas 31,84 km atau 18,11 % dan yang paling kecil adalah Kecamatan Mariso dengan luas 1,82 Km atau 1,04 % dari luas kota Makassar.

Sedangkan kecamatan yang memiliki kelurahan terbanyak adalah kecamatan Tallo yaitu 15 kelurahan. Walau memiliki kelurahan yang banyak luas kecamatan ini hanya 5,83 Km atau 3,32 % dari luas kota Makassar. Kecamatan yang paling sedikit kelurahannya adalah kecamatan Manggala dan Tamalanrea yakni hanya 6 kelurahan, sementara kelurahan ini termasuk memiliki wilayah yang luas yaitu 24,14 Km atau 13,37 % dari luas kota Makassar dan Tamalanrea 31,48 Km atau 18,11 % dari luas kota Makassar. Selain wilayah daratan, kota Makassar juga memiliki wilayah yang berbentuk pulau. Kecamatan yang memiliki wilayah yang berbentuk pulau adalah kecamatan Wajo dan kecamatan Ujung Tanah.

2. Keadaan Penduduk

Kota ini termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya. Sedangkan dari aspek demografis, penduduk kota Makassar sangat heterogen. Terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama serta latar belakang sosial yang beragam pula. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa. Sejak abad ke 16, kota Makassar merupakan pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur dan kemudian menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana semua orang yang berkunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan dan menolak upaya VOC (Belanda) ketika itu untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di kota tersebut.

Masyarakat di kota Makassar terkenal religius, hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah-rumah peribadatan. Untuk tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu mesjid sangat banyak, sehingga kota Makassar juga dikenal dengan negeri seribu menara. (maksudnya menara mesjid). Di samping sikap religius, masyarakat kota Makassar juga memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Hal ini berarti bahwa meskipun agama Islam menjadi agama mayoritas, tetapi pemeluk agama yang lain tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Mereka bebas untuk beribadah menurut agamanya masing-masing serta bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, seperti perdagangan. Hal menyebabkan sehingga sejak masa penjajahan, kota Makassar menjadi pusat perdagangan yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi

pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan raja Gowa dan Tallo yang memerintah saat itu, yaitu Sultan Alauddin sebagai raja Gowa dan Sultan Awalul Islam sebagai raja Tallo.

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa dan Tallo yang mereka anggap sebagai penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur. Setelah berperang dengan habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kisah sejarah tentang Makassar ini juga disebutkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14.

B.Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan adalah kota metropolitan, penduduknya sangat heterogen sehingga keadaan agama, sosial dan budaya juga beragam yang tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya. Salah satu hal yang membutuhkan perhatian adalah masalah pendidikan dan agama. Pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia menempati posisi penting karena menentukan corak dari pembangunan suatu bangsa yang berimplikasi pada sektor pembangunan yang lain, seperti sektor ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Posisi tersebut menjadi penting karena manusia adalah pelaku dari seluruh kegiatan pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan juga diperuntukkan bagi manusia. Jika sumber daya manusia rendah, maka sulit untuk mengharapkan negara menjadi maju.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan, maka GBHN tahun 2004 mengamanahkan agar anggaran sektor pendidikan dialokasikan 20 % dari jumlah APBN. Amanah tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran

pendidikan telah dinaikkan, yang perlu mendapat perhatian sekarang adalah dalam proses pemanfaatan dan pendistribusian anggaran tersebut bisa tepat sasaran. Hal ini, sangat mendasar mengingat bahwa salah satu komponen pengembangan sumber daya manusia adalah dalam bidang pendidikan, termasuk di kota Makassar dengan visi dan misi yang tercakup, pendidikan merupakan sektor yang menjadi prioritas. Pada kerangka dasar pembangunan sumber daya manusia (*human resource development*), terdapat dua aspek penting sebagai masukan dalam peningkatan produktivitas yaitu faktor kesehatan dan faktor pendidikan. Selain itu produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan, pandangan hidup dan sikap mental yang termasuk didalamnya etos kerja, motivasi dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang bersifat *unmeasurable* yang dimasukkan dalam aspek pendidikan serta aspek lain di luar kerangka pengembangan sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas para birokrasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. pengikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang akan berdampak pada perbaikan *performance* dalam mengerjakan pekerjaannya. Peningkatan pendidikan pada masyarakat umum akan menyebabkan peningkatan partisipasi dalam pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di kota masyarakat mengalami peningkatan setiap waktu. Pemerintah propinsi dan daerah telah mengapresiasi hal tersebut dengan mencanangkan program pendidikan gratis pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Program tersebut telah berjalan kurang lebih empat tahun dan berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan program unggulan pemerintah yang melibatkan semua unsur baik pemerintah sendiri maupun masyarakat secara luas dan pihak swasta. Hal ini ditandai dengan dibangunnya sarana dan prasarana dan pendidikan dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. Peningkatan mutu pendidikan di kota Makassar melibatkan stakeholder dan pemerintah di dalam meramu tuntutan tersebut kemudian diimplementasikan dalam wujud pembangunan dan diakhiri dengan evaluasi

kebijakan yang ditandai dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, disiapkan berbagai fasilitas pendukung diantaranya sekolah, ruang belajar, kelas, guru, dan murid juga kurikulum. Di kota Makassar jumlah sekolah dasar sebanyak 448 unit dengan jumlah guru sebanyak 5.747 orang dengan jumlah murid 148.179 orang. Jumlah SLTP sebanyak 172 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.369 orang dan jumlah murid sebanyak 59.878 orang. Jumlah SMA sebanyak 110 unit dengan guru sebanyak 1.589 dan murid sebanyak 41.738 orang.

Dari data potensi tersebut di atas, ternyata penyebaran siswa tidak merata. Sehingga ada sekolah yang padat dan ada juga yang kurang termasuk ratio guru juga tidak merata. Permasalahan ini memerlukan penanganan yang serius dalam upaya untuk mencerdaskan anak bangsa, utamanya dalam peningkatan kualitas pembelajaran di semua tingkat pendidikan. Dari seluruh jumlah sekolah yang ada di Makassar, lembaga pendidikan agama Islam yang dikelola oleh Departemen Agama masih sangat sedikit, baik yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. Itupun banyak yang dikelola oleh swasta, sehingga mutunya tentu tidak bisa diharapkan sama dengan sekolah yang dikelola oleh pemerintah.

Realitas tersebut tentu menyedihkan mengingat penduduk kota Makassar mayoritas beragama Islam. Hal ini berhubungan dengan dana dan fasilitas yang menyebabkan kualitas lembaga pendidikan Islam mengalami hambatan yang serius, dan dibutuhkan usaha yang serius untuk mensejajarkan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta serta lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Namun demikian, kepedulian masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam cukup tinggi, sehingga ada beberapa organisasi keagamaan maupun lembaga yang mendirikan sekolah, walaupun statusnya sekolah swasta.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa penduduk kota Makassar sangat heterogen, demikian juga dengan agama yang dianut oleh masyarakat. Agama Islam adalah agama yang mayoritas, selanjutnya agama Kristen dan agama Katolik, kemudian Budha dan Hindu. Meskipun penyebaran penganut beragama di setiap kecamatan bervariasi namun tingkat kerukunan antar pemeluk beragama cukup tinggi. Tokoh agama memegang peranan penting dalam hal ini. Di samping itu, tokoh agama adalah motor penggerak

umat beragama sekaligus sebagai pemegang amanah dalam menyiarkan agama dengan gerakan dakwah. Organisasi keagamaan maupun tokoh agama sudah seharusnya menjadi agen-agen perubahan (*agent of change*) di tengah masyarakat dalam rangka penciptaan kehidupan yang lebih baik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik dan Pengetahuan Responden Tentang Hizbut Tahrir

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang di ambil dari data angket (kuesioner) dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang responden yang menggambarkan validitas data yang terkumpul, mengingat responden penelitian mempunyai latar belakang beragam dan variatif. Mengenai subyek penelitian telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa unit analisis pengamatan adalah anggota majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat dan remaja yang bertempat tinggal di empat kecamatan sampel. Apa yang dikemukakan dalam identitas responden ini erat kaitannya dengan masalah yang di bahas yaitu peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di kota Makassar. Adapun karakteristik tersebut tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	2	3	4
1.	20 - 30	37	29,6 %
2.	31 - 40	51	40,8 %
3.	41 - 50	25	20 %
4.	51 keatas	12	9,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2012

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok umur antara 31 sampai 40 tahun yaitu 51 orang (40,8 %), ini berarti bahwa di empat kecamatan yang menjadi sampel wilayah penelitian, kelompok inilah yang paling banyak berinteraksi dengan Hizbut Tahrir. Kata berinteraksi dalam hal ini tidak berarti bahwa mereka adalah kader Hizbut Tahrir tetapi mereka pernah mendengar, mengetahui ataupun ikut dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir minimal mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh kader Hizbut Tahrir di mesjid, acara pengajian majelis taklim,

maupun dalam kegiatan keagamaan lainnya. Kelompok umur 20-30 tahun menempati urutan kedua terbanyak yang berjumlah 37 orang (29,6 %). Kelompok umur ini kebanyakan berlatar belakang sebagai mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir memang mendapat sambutan yang baik dikalangan mahasiswa. Dari aspek historis perkembangan awal Hizbut Tahrir di Sulawesi Selatan dan khususnya kota Makassar di pelopori oleh mahasiswa. Walaupun tidak semua responden yang berada dalam kategori kelompok umur ini adalah kader langsung Hizbut Tahrir, tetapi data tersebut cukup menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir cukup di kenal dikalangan kaum muda. Hasil wawancara dengan salah seorang kader Hizbut Tahrir yang menyatakan bahwa :

“Banyak kader Hizbut Tahrir yang berstatus sebagai mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di kota Makassar. Maka tidak heran bila kemudian banyak acara Hizbut Tahrir yang dilaksanakan dikampus-kampus. Mereka secara rutin melakukan *halaqah* dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah digariskan oleh organisasi, dan termasuk kelompok yang solid dalam melakukan kegiatan-kegiatannya.” (Wawancara dengan R, mahasiswa dan aktivis HT).

Sementara itu, kelompok umur 51 tahun ke atas hanya sedikit yaitu 12 orang (9,6 %). Memang kelompok umur ini tidak terlalu banyak mengetahui tentang Hizbut tahrir, bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak tahu. Setelah peneliti berusaha untuk menjelaskan dalam wawancara barulah mereka sedikit mengerti, dan mengatakan bahwa mereka pernah mendengar penceramah yang berbicara tentang negara Islam (khilafah) tetapi mereka tidak tahu bahwa itulah Hizbut Tahrir.

Karakteristik selanjutnya adalah tingkat pendidikan responden seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikannya

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Sekolah Dasar	5	4 %
2.	SLTP	16	12,8 %
3.	SLTA	32	25,6 %
4.	Mahasiswa	30	24 %
5.	Sarjana (S1)	36	28,8 %
6.	Sarjana (S2)	6	4,8 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden cukup bagus, di mana mayoritas responden berpendidikan sarjana yaitu 36 orang (28,8 %), sehingga tentunya dalam pengumpulan data sangat membantu karena mereka memiliki kemampuan untuk menganalisa dan dapat mengerti dengan baik apa yang ditanyakan oleh peneliti, sehingga data yang didapatkan akan valid. Selain itu tingkat pendidikan responden yang berada pada kelompok SLTA 32 orang (25,6 %) dan mahasiswa 30 (24 %). Responden yang berpendidikan SD dan SLTP juga ada, namun keduanya hanya berjumlah 21 orang (16,8 %).

Karakteristik selanjutnya adalah jenis kelamin responden sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Jenis kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	42	33,6 %
2.	Perempuan	83	66,4 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden terbanyak adalah perempuan yang berjumlah 83 orang (66,4 %), sementara responden laki-laki berjumlah 42 orang (33,6 %). Kebanyakan dari responden perempuan tersebut adalah ibu rumah tangga dan anggota majelis taklim. Beberapa di antaranya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir,

seperti diskusi, seminar, temu tokoh dan *masirah*. Sementara responden pria adalah mereka yang berlatar belakang sebagai tokoh agama sejumlah 10 orang (8 %), sisanya adalah PNS dan wiraswasta serta mahasiswa.

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Pekerjaannya

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	PNS/Pendidik	27	21,6 %
2.	Tokoh Agama	10	8 %
3.	Pengusaha/Wiraswasta	26	20,8 %
4.	Mahasiswa	30	24 %
5.	Urusan Rumah Tangga	32	25,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa pekerjaan responden bervariasi, ini berarti elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat sudah terwakili dan hal ini berkaitan langsung dengan keadaan keseharian mereka, sehingga pendapat mereka tentang peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan masyarakat signifikan. Pekerjaan responden sebagai PNS berjumlah 27 (21,6 %). Selain itu responden yang dominan adalah ibu rumah tangga berjumlah 32 (19,2 %). Sebagian dari ibu-ibu ini, pernah mengikuti atau mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh kader Hizbut Tahrir. Pengenalan responden ibu-ibu terhadap HT melalui pengajian majelis taklim atau acara-acara keagamaan di mesjid lingkungan tempat tinggalnya. Pekerjaan responden yang lain adalah mahasiswa sejumlah 30 orang (24 %) dan responden yang bekerja sebagai pengusaha sebanyak 26 orang (20,8 %). Juga diambil responden dari kelompok tokoh agama sebanyak 10 orang (8 %).

Pada dasarnya tokoh agama berfungsi sebagai penasehat, penganjur amar maruf nahi mungkar, karena itu mereka harus mampu menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Secara sosiologis, seorang tokoh agama bisa menjadi *agent of change*, pembawa perubahan di masyarakat. Tokoh agama dalam Islam atau ulama adalah pewaris para Nabi. Di tangan ulamalah masa depan umat ini dipertaruhkan. Perannya sangat dinanti, membawa umat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera yang menurut perpektif

Hizbut Tahrir, kesejahteraan dalam bingkai khilafah. Dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir, peran ulama sangat menentukan karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Karena itu Hizbut Tahrir dalam upaya pencapaian tujuan organisasinya senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan, tanpa memandang apakah mereka itu dari Nahdatul Ulama (NU) atukah Muhammadiyah dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah dengan cara bersilatullah atau berkunjung ke tempat atau kediaman tokoh bersangkutan. Kemudian memberikan pemahaman tentang bagaimana Hizbut Tahrir sesungguhnya dan apa tujuannya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang aktivis HT mengatakan bahwa banyak di antara tokoh-tokoh agama tersebut bersikap tidak menerima begitu, apalagi kalau yang datang ke pada mereka masih muda-muda, sehingga muncul anggapan “saya lebih paham agama daripada anda,” tetapi setelah didatangi berkali-kali oleh kader HT tanpa rasa bosan, akhirnya diantara tokoh-tokoh itu menerima ide-ide HT dan biasanya mereka mau menjadi pembicara di acara-acara yang dilaksanakan atau minimal menghadiri acara tersebut.

Hizbut Tahrir dalam melakukan dakwah dan perjuangannya betul-betul didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, itu yang disebut dengan *thariqah dakwah*. Dari pemahaman tentang *thariqah dakwah* Rasulullah SAW maka dihasilkan kesimpulan bahwa itu harus dijalankan dengan cara seperti yang terurai sebelumnya. Apa yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah meniru cara dakwah Nabi, melalui dakwah *fikriyah dan siyasiah*. Dalam *dakwah siyasiah* itu Rasulullah SAW melakukan kontak dan komunikasi tertentu kepada orang-orang yang berpengaruh dan memiliki kekuatan (tokoh agama dan masyarakat). hal inilah yang menyebabkan sehingga Hizbut Tahrir secara intens melakukan kegiatan “Temu Tokoh,” tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Itulah yang disebut dengan *thalabun nushrah*. *Thalabun nushrah* itu diperlukan dalam dua hal : pertama, *himayatut dakwah* (perlindungan dakwah), kedua, *istilamu hukmi*, mendapatkan kekuasaan di suatu wilayah sehingga syariah Islam dapat diterapkan secara kaffah.

Tabel berikutnya adalah hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pengetahuan responden tentang organisasi Hizbut Tahrir. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Pengetahuannya Tentang Hizbut Tahrir

No.	Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mengetahui	10	8 %
2.	Mengetahui	58	46,4 %
3.	Kurang Mengetahui	38	30,4%
4.	Tidak Mengetahui	19	15,2 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data menunjukkan bahwa 58 orang (46,4 %) responden mengetahui tentang HT, hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh aktivis-aktivis HT di kota Makassar cukup berhasil. Sosialisasi yang dilakukan beragam, dalam bentuk tertulis (bulletin Alwai, Tabloid Media Umat dan lain-lain), mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi publik, diskusi terbatas, temu tokoh dengan mengundang beberapa unsur yang ada di masyarakat seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, ibu-ibu majelis taklim, pengurus mesjid dan sebagainya. Di antara responden ada yang sangat mengetahui tentang HT sejumlah 10 orang (8 %), dan setelah diklarifikasi melalui data wawancara ternyata mereka terlibat secara langsung dengan HT. Ada memang anggota HT dan ada yang pernah mengikuti *halaqah* tetapi tidak lanjut ke tahap berikutnya karena sesuatu alasan dan ada responden yang hanya tertarik dengan pemikiran atau ide-ide HT tetapi tidak mau menjadi anggota atau aktivis. Responden yang memang tidak tahu tentang HT hanya 19 orang (15,2 %). Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berpendidikan rendah (hanya tamat SD atau SMP), kesehariannya sebagai ibu rumah tangga atau wirausaha (menjahit dan menjual). Penyebab dari ketidaktahuan tersebut adalah karena mereka tidak pernah atau jarang mengikuti pengajian majelis taklim atau acara-acara keagamaan yang dilaksanakan di mesjid, alasannya karena sibuk

bekerja atau menguru anak dan rumah tangganya. Mereka juga tidak ada upaya untuk tahu tentang Hizbut Tahrir.

Data pada tabel 6 berkaitan erat dengan tabel 5, karena apabila responden tahu tentang Hizbut Tahrir berarti mereka juga tahu apa tujuan dari organisasi tersebut, walaupun ternyata kemudian hasil penelitian tidak menunjukkan seperti itu, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Pengetahuannya Tentang Tujuan Hizbut Tahrir

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mengetahui	10	8 %
2.	Mengetahui	58	46,4 %
3.	Kurang Mengetahui	24	19,2 %
4.	Tidak Mengetahui	33	26,4 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data yang menonjol yang dapat dibuktikan oleh peneliti adalah bahwa pada tabel 5 terlihat jumlah responden yang tidak mengetahui tentang Hizbut Tahrir berjumlah 19 orang (15,2 %), sedangkan pada tabel 6 jumlah responden yang tidak mengetahui tentang tujuan hizbut Tahrir sejumlah 33 orang (26,4 %). Hal ini berarti bahwa 19 orang responden tahu tentang HT tetapi 14 (11,2 %) di antara mereka tidak tahu tujuan dari Hizbut Tahrir.

Sementara itu, pengetahuan responden tentang apa yang di maksud dengan Daulah Khilafah dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Pengetahuannya Tentang Daulah Khilafah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	76	60,8 %
2.	Tidak Mengetahui	49	39,2 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengetahui tentang khilafah adalah 76 orang (60,8 %) sedangkan yang tidak mengetahui berjumlah 49 orang

(39,2%). Responden yang mengetahui tentang khilafah adalah yang tahu tentang Hizbut Tahrir serta mengerti apa tujuan organisasi ini. Tetapi ada juga responden yang tidak tahu HT, tetapi tahu apa itu Khilafah. Setelah diwawancara katanya Khilafah itu adalah bentuk negara Islam. Faktor penyebab yang lain adalah kata Khilafah familiar di masyarakat, hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir dalam setiap aksinya selalu membawa spanduk dan sejenisnya yang bertuliskan “Khilafah adalah solusi terbaik umat saai ini,” atau kata-kata lain yang kurang lebih sama dengan itu.

Kemudian untuk mengetahui apakah responden tertarik dengan Hizbut Tahrir termasuk pemikiran dan ide-idenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Ketertarikannya Terhadap Hizbut Tahrir

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	9	7,2 %
2.	Tertarik	36	28,8 %
3.	Kurang Tertarik	50	40 %
4.	Tidak Tertarik	30	24 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni 50 orang (40 %) tidak tertarik dengan Hizbut Tahrir. Alasan yang dikemukakan oleh responden bermacam-macam, antara lain bahwa HT itu termasuk keras dalam menetapkan aturan (hukum). Seperti dalam memakai busana muslim harus baju gamis (terusan atau kurung) tidak boleh memakai pakaian yang terpotong (baju blouse, rok atau celana). Sehingga kata responden bagaimana kalau kita hanya punya rok saja, jadi apakah tidak boleh menutup aurat dengan itu. Tetapi walaupun demikian, mereka setuju dengan ide Hizbut Tahrir untuk mendirikan negara Khilafah (Islam) supaya hukum bisa ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu dan hukum tidak bisa dibeli seperti sekarang ini, karena hukum yang ditegakkan adalah hukum Islam yang dibuat oleh Allah SWT untuk umat manusia.

**Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Persetujuannya Terhadap Gerakan-
Gerakan Hizbut Tahrir**

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	10	8 %
2.	Setuju	60	48 %
3.	Kurang Setuju	31	24,8 %
4.	Tidak Setuju	24	19,2 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 60 orang responden (48 %) setuju dengan gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang selalu dilakukan dengan damai, tertib, tidak anarkis dan tidak mengganggu masyarakat umum. Hal ini dapat kita lihat pada saat HT melakukan *masirah* misalnya ketika menolak sesuatu (kedatangan presiden Barack Obama ke Indonesia ditolak oleh HT) atau memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama ataukah kebijakan yang merugikan masyarakat, berlangsung dengan baik. Hal ini bisa dibandingkan dengan kelompok mahasiswa ketika melakukan demo yang menyebabkan jalan-jalan umum menjadi macet total dan kadang bersifat anarkis. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh HT bermuara pada tujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang kondisi yang dialami oleh mereka saat ini dengan sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan itulah faktor utama penyebab munculnya banyak masalah dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk lebih menguatkan hasil penelitian maka pada tabel 10 dapat dilihat data tentang bagaimana keterlibatan responden dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HT. Jumlah kategori jawaban yang mayoritas adalah 69 (55,2 %) responden tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir. Mereka hanya tahu Hizbut Tahrir dari ceramah-ceramah atau melihat aktivis Hizbut Tahrir di jalan ketika melakukan *masirah* atau demonstrasi tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Hizbut Tahrir. Tentang hal ini, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Distribusi Responden Berdasarkan Keterlibatannya Terhadap Kegiatan-Kegiatan Hizbut Tahrir

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Terlibat	10	8 %
2.	Terlibat	26	20,8 %
3.	Kurang Terlibat	20	16 %
4.	Tidak Terlibat	69	55,2 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Hizbut Tahrir adalah kelompok dakwah yang diperintahkan menasehati siapa saja, sedangkan yang perlu untuk dinasehati itu adalah penguasa yang mengurus segala masalah umat tanpa dibatasi. Maka dakwah seperti ini bisa disebut aktivitas politik dan kelompoknya bisa disebut sebagai partai politik. Organisasi ini menyerukan penerapan syariat Islam, namun berbeda dengan yang lainnya, Hizbut Tahrir tidak terjebak pada sekedar usaha memasukkan piagam Jakarta ke amandemen UUD 1945, Hizbut Tahrir justru mengusulkan suatu rancangan konstitusi yang baru yang seluruh pasalnya diambil dari ajaran Islam. Mereka memandang syariat Islam sebagai solusi integral (politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam). Karena itu syariat Islam tidaklah sekedar hukum Islam, seperti hukum potong tangan, atau rajam bagi pezina. Dalam masalah ekonomipun, ekonomi syariat tidak sekedar ekonomi anti riba plus zakat, namun lebih jauh mulai dari paradigma, teori harga, peran negara dan sebagainya. Karena itu, peran Hizbut Tahrir dalam masyarakat sebenarnya adalah membuat perubahan, yaitu perubahan dari sistem yang ada sekarang ke sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan hayat hidup orang banyak. Sedangkan sistem yang sesuai itu hanya ada dalam agama Islam karena dibuat oleh sang maha pembuat aturan Allah SWT yang tahu betul hakekat manusia dan apa yang terbaik buat manusia karena mereka adalah ciptaannya. Mengingat peran penting yang di emban oleh Hizbuta Tahrir, maka berikut ini diuraikan tabel tentang bagaimana sesungguhnya peran Hizbut Tahrir di masyarakat.

Tabel 12. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Di Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	14	11,2 %
2.	Berperan	57	45,6 %
3.	Kurang berperan	29	23,2 %
4.	Tidak berperan	25	20 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data pada tabel di atas memberikan pemahaman bahwa 57 orang (45,6%) responden menyatakan bahwa Hizbut Tahrir berperan di masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, secara sederhana peran adalah aspek dinamis dari status. Hizbut Tahrir memiliki status sebagai organisasi keagamaan seperti yang dikenal oleh masyarakat kebanyakan, walaupun sebenarnya dari segi bahasa Hizbut Tahrir berarti partai pembebasan yang dalam aktualitasnya melakukan kegiatan-kegiatan politik. Sebagai organisasi keagamaan, maka peran utama Hizbut Tahrir adalah dalam bidang dakwah. Banyak di antara aktivis HT yang terjun ke masyarakat sebagai penceramah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan menganjurkan amar maruf nahi mungkar.

Dalam ceramahnya seringkali aktivis Hizbut Tahrir menyampaikan ide-ide organisasinya, pernyataan yang sering disampaikan bahwa apa yang terjadi pada saat ini, disebabkan karena sistem yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa adalah sistem yang kufur, sistem yang tidak memihak pada rakyat tetapi memihak pada bangsa barat dan sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, Islam adalah solusi untuk keluar dari segala permasalahan yang ada. Islam tidak mungkin dapat ditegakkan dengan baik kalau tidak dibingkai dalam bentuk negara yaitu Daulah khilafah Islamiyah. Sekarang kita dipersilahkan mau memilih untuk ikut berjuang menegakkannya atau hanya berdiam diri sebagai penonton yang tidak mendapatkan apapun dan tidak tercatat sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Dari hasil wawancara peneliti dengan seorang informan secara tegas menyatakan bahwa :

“Tidak ada kemuliaan manusia tanpa agama Islam dan tidak ada Islam tanpa syariah dan tidak ada syariah tanpa khilafah. Syariah tanpa khilafah itu sesuatu yang tidak sempurna.” (Wawancara dengan HR aktivis HT).

Untuk memberikan data yang lebih akurat lagi tentang bagaimana sesungguhnya peran Hizbut Tahrir dalam bidang dakwah, maka tabel berikut dapat kita cermati.

Tabel 13. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Bidang Dakwah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	26	20,8 %
2.	Berperan	60	48 %
3.	Kurang berperan	17	13,6 %
4.	Tidak berperan	22	17,6
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Pada tabel 12 jelas terlihat bahwa Hizbut Tahrir berperan dalam bidang dakwah di masyarakat. responden yang menjawab seperti itu berjumlah 60 orang (48 %). Hal ini berarti bahwa peran dakwah Hizbut Tahrir tidak diragukan lagi, dan memang dari segi sumber daya manusia Hizbut Tahrir telah mempersiapkan kader-kadernya dengan mewajibkan mereka untuk mengaji (melakukan pengkajian/*halaqah*). Sehingga mereka betul-betul siap ketika terjun ke masyarakat dengan berbekal ilmu agama yang telah dikaji.

Kemudian hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana peran hizbut Tahrir dalam bidang politik. Tabel 13 menunjukkan data tentang hal tersebut.

Tabel 14. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Bidang Politik

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	16	12,8 %
2.	Berperan	31	24,8 %
3.	Kurang berperan	32	25,6 %
4.	Tidak berperan	46	36,8 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Penguraian data pada tabel 13 menunjukkan bahwa 16 (12, %) orang responden menjawab sangat berperan, 31 (24,8 %) menjawab berperan, 32 (25,6 %) menjawab kurang berperan dan 46 (36,8 %) orang responden menjawab Hizbut Tahrir tidak berperan dalam bidang politik. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian terdahulu bahwa Hizbut Tahrir adalah Partai Pembebasan yang lahir dari keprihatinan terhadap kondisi kaum muslimin di hampir setiap tempat baik sebagai minoritas maupun mayoritas, umat Islam cenderung tersisihkan dan dalam kondisi sosial ekonomi yang terkalahkan.

Hizbut Tahrir ingin membebaskan kaum muslimin dari penderitaan yang berkepanjangan tersebut. Dengan demikian, sebenarnya Hizbut Tahrir telah melakukan kegiatan politik, karena memikirkan untuk memperbaiki kehidupan umat secara keseluruhan. Pengertian politik menurut Hizbut Tahrir berbeda dengan pengertian masyarakat secara umum. Masyarakat mengartikan politik adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam kegaitan-kegiatan politik seperti ikut kampanye, ikut memilih mulai dari tingkat walikota/bupati, legislatif sampai presiden. Atau dalam pengetrtian yang lebih sempit lagi bahwa berpolitik berarti menjadi anggota partai politik, menjadi walikota/bupati, anggota DPRD, anggota DPR atau masuk kedalam jajaran birokrasi bahkan menjadi presiden. Menurut pengamatan peneliti, kedua persepsi yang berbeda inilah yang menyebabkan mengapa responden berpendapat bahwa Hizbut Tahrir tidak berperan dalam bidang politik. Padahal aktivitas politik Hizbut Tahrir adalah *high politics* atau *smart and smarting politics*.

Secara politis Hizbut Tahrir bukan anti pemerintah tetapi tidak boleh taat kepada pemerintah ketika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah Islam.

Maka dari itu Hizbut Tahrir tidak mau terlibat ke dalam birokrasi pemerintahan, karena pemerintah yang ada sekarang diatur tidak berdasar pada syariah Islam. Jika seseorang masuk ke tempat yang “kotor” maka otomatis akan kotor juga. Bagaimanapun idealis atau bersihnya seseorang, sebab sistem itulah yang akan mewarnai bukan sebaliknya, dia yang mewarnai sistem sebab dia minoritas. Hizbut Tahrir tidak terlibat (golput) dalam pemilu dalam bentuk apapun namanya. Mereka lebih memilih untuk berperan di luar birokrasi (ekstra parlemen), dengan melakukan penyadaran dan perubahan pola pikir masyarakat. Sampai kemudian masyarakat sendiri secara keseluruhan yang akan melakukan perubahan.

Selama ini yang dipersepsi berperan dalam politik adalah partai politik. Partai politik diartikan ikut pemilu dan mendapatkan kursi di parlemen dan berjuang di parlemen. Sedangkan Hizbut Tahrir yang sebenarnya sebagai sebuah partai politik tidak melakukan hal itu. Sehingga dapat dipahami bila ada yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Dalam suatu media, juru bicara Hizbut Tahrir bapak Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa : “ Sebenarnya Hizbut Tahrir telah melakukan fungsi-fungsi sebuah partai politik, yang pertama fungsi edukasi (pendidikan politik), kedua fungsi artikulasi atau menyuarakan aspirasi rakyat dan ketiga fungsi agregasi, keempat fungsi representasi (perwakilan). Memang fungsi keempat belum dilakukan oleh Hizbut Tahrir, dan fungsi inilah yang menyita banyak perhatian dan konsentrasi parpol yang lain. Karena dari sanalah eksistensi parpol akan di ukur sejauh mana dia memiliki wakil-wakil rakyatnya di parlemen hasil pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali di Indonesia.

Jadi sebenarnya kalau di lihat dari perspektif perubahan sosial maka Hizbut Tahrir sesungguhnya sedang melakukan dakwah yaitu dakwah *fikriyah* dan dakwah *siyasiyah*. Dakwah itu ada tiga macam, pertama dakwah *fikriyah* yaitu dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan serta membantah pemikiran yang tidak Islami. Kedua dakwah *siyasiyah* yaitu dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariah dan khilafah. Ketiga dakwah *askariyah* yaitu dakwah melalui kekuatan militer atau jihad fisabilillah. Hizbut Tahrir sekarang sedang melakukan dakwah *fikriyah* dan *siyasiyah* sekaligus melalui berbagai *uslub* (cara) dan *wasilah* (sarana). Baik secara langsung maupun tidak langsung. secara

secara langsung diantaranya melalui forum-forum publik seperti seminar, diskusi, talkshow, tabligh akbar, khutbah jum,at, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam satu minggu melakukan puluhan bahkan mungkin ratusan forum-forum semacam itu. Sedangkan secara tidak langsung adalah melalui media cetak, misalnya majalah al-Wa'ie yang terbit sekali sebulan, tabloid Media Umat yang terbit dua kali sebulan yang tirasnya 30 ribu eksemplar, dan bulletin Al-Islam yang terbit setiap hari Jumat yang tirasnya sekarang sudah lebih dari satu juta eksemplar. Ditambah lahirnya situs www.hizbut-tahrir.or.id yang bisa diakses para pengguna internet setiap saat.

Semua usaha yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam rangka menyebarkan pemikiran Islam dan membantah pemikiran yang bertentangan dengan Islam sehingga muncul kesadaran yang erat kaitannya dengan dakwah yang kedua yaitu *siyasiyah*, yakni kesadaran politik Islam. Sehingga muncul kesadaran sebagai seorang muslim yang hanya mau diatur oleh syariah Islam saja. Melalui dakwah politik ini Hizbut Tahrir menginginkan perubahan politik yaitu perubahan tatanan kekuasaan sekuler menjadi Islam. Hal itu akan terjadi melalui kekuatan umat yang sadar akan politik Islam yang lahir dakwah *fikriyah* dan *siyasiyah* itu.

Di samping peran dalam bidang dakwah dan politik, Hizbut Tahrir juga berperan dalam bidang sosial. pada tabel berikut tergambar data mengenai hal tersebut.

Tabel 15. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir dalam Bidang Sosial

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	9	7,2 %
2.	Berperan	52	41,6 %
3.	Kurang berperan	18	14,4 %
4.	Tidak berperan	46	36,8 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa HT memiliki peran dalam sosial dalam masyarakat. sebanyak 52 (41,6 %) orang responden menjawab seperti itu. Peran sosial yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah dalam upaya melakukan perubahan di

masyarakat dalam segala aspeknya. Hizbut Tahrir berupaya agar di dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa sesuai dengan syariah Islam, sehingga di masyarakat tercipta kedamaian dan kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Walaupun Hizbut Tahrir tidak melakukan sesuatu secara fisik, misalnya membangun gedung atau membuat jalan tetapi yang dilakukan adalah sesuatu yang sifatnya mendasar yaitu melakukan penyadaran pada masyarakat bahwa kondisi mereka saat ini sedang tidak baik atau terpuruk yang diakibatkan oleh karena sistem yang di pakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sistem Islam. Sementara itu, peran Hizbut Tahrir dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Bidang Pendidikan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	16	12,8 %
2.	Berperan	49	39,2 %
3.	Kurang berperan	19	15,2%
4.	Tidak berperan	41	32,8 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa Hizbut Tahrir memiliki peran dalam bidang pendidikan, responden yang menjawab demikian sejumlah 49 orang (39,2 %). Untuk kategori jawaban tidak berperan sejumlah 41 (32,8 %). Kemudian untuk jawaban kurang berperan sejumlah 19 Orang (15,2 %). Kategori terakhir adalah sangat berperan sejumlah 16 (12,8 %). Dalam bidang pendidikan Hizbut Tahrir melakukan upaya pencerdasan melalui penyadaran kepada masyarakat bahwa sistem pendidikan yang dipakai di negara kita saat ini adalah sistem pendidikan sekuler yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kurikulum yang dipakai hanya menargetkan supaya anak didik tahu, kemudian diuji dan dapat nilai. Pelajaran yang diajarkan sebagian besar terlepas dari ajaran agama. Seharusnya agama Islam menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga tercipta generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Dalam pandangan Hizbut Tahrir bahwa sistem pendidikan yang bagaimanapun yang diterapkan, kalau bukan sistem Islam

tidak akan mampu membawa perubahan bagi masa depan seluruh elemen bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya pada tabel berikut diuraikan tentang peran Hizbut Tahrir dalam bidang ekonomi.

Tabel 17. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Bidang Ekonomi

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	10	8 %
2.	Berperan	23	18,4 %
3.	Kurang berperan	30	24 %
4.	Tidak berperan	62	49,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi Hizbut Tahrir tidak berperan, yang dibuktikan dengan jumlah responden yang menjawab seperti itu sejumlah 62 (49,6 %). Posisi terbanyak kedua adalah kategori jawaban kurang berperan yaitu 30 (24 %). Selanjutnya 23 (18,4 %) orang responden dan hanya 10 (8 %) yang menjawab sangat berperan. Jawaban dari responden-repsonden tersebut di atas tidaklah keliru, sebab mereka menjawab sesuai dengan yang dirasakan. Kalau kita mengamati memang Hizbut Tahrir tidak melakukan perubahan ekonomi secara langsung, misalnya dengan membuka lapangan kerja agar anggota masyarakat yang masih menganggur bisa terserap atau memberikan modal usaha, sehingga kehidupan ekonomi dapat meningkat dan tercapai kesejahteraan rakyat.

Hizbut Tahrir dalam aksinya melakukan perubahan pola pikir masyarakat, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, jika tidak didasarkan pada syariah Islam maka hasilnya tidak bisa diharapkan untuk merubah keadaan. Karena itu dalam kehidupan ekonomi pun harus diatur dengan syariah, misalnya hentikan semua praktek-praktek ekonomi kapitalis dan ribawi. Sebab keduanya dilarang dalam syariah Islam. Sementara kita sama-sama mengetahui dari realitas masyarakat saat ini, justru kedua praktek itulah yang paling banyak dilakukan. Orang tidak peduli lagi apakah usaha-usaha yang dilakukannya bertentangan dengan ajaran agama atau tidak, yang jelas

bahwa mereka telah berusaha untuk mencari uang untuk menghidupi diri dan keluarganya. Sehingga kemudian dari ketidakpedulian itu menyebabkan timbulnya berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan, melakukan riba, mengambil hak orang mulai dari cara yang halus (misalnya menipu dan hipnotis) sampai ke cara yang kasar seperti menjambret, mencopet dan lainnya.

Ketika upaya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam merubah pola pikir masyarakat telah berhasil maka secara otomatis masyarakat akan paham bagaimana ajaran agama Islam mengatur ekonomi, ketika itu mereka juga akan mempraktekkannya dalam kehidupan. Dalam persoalan budaya pun demikian pula adanya. Bahwa sepanjang sistem maupun sub sistem yang ada di dalam masyarakat tidak sesuai dengan syariat Islam maka tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan yang membelit negara dan bangsa saat ini. Walaupun data pada tabel berikut menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir tidak berperan dalam bidang budaya, jawaban responden yang berjumlah 57 (45,6 %) membuktikan hal itu. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang dipahami peran dalam bidang budaya oleh masyarakat dan Hizbut Tahrir tidak sama. Masyarakat lebih melihat dalam bentuk fisik mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan dan mengontrol atau memikirkan, mengerjakan dan mengawasi. Apa yang direncanakan, dikerjakan oleh Hizbut Tahrir adalah yang berkaitan dengan kebudayaan dan bagaimana mengawasi pelaksanaannya. Hal inilah yang dinilai oleh masyarakat. mereka sebagian besar tidak tahu bahwa saat ini Hizbut Tahrir berada pada tahap kesadaran dan sosialisasi di masyarakat, entahlah di masa yang akan datang apakah bisa melakukan aksi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, sebab tuntutan mereka seperti itu.

Menurut Hizbut Tahrir, hal terpenting yang harus dilakukan dengan menggunakan logika yang sederhana bahwa apa punyang diinginkan oleh umat Islam basisnya sama yaitu kesadaran. Contoh, berkembangnya bank-bank syariah. Perkembangan bank syariah itu memerlukan kesadaran seorang muslim yang melihat bahwa dalam melakukan kegiatan keuangan itu harus bebas dari riba dan betul-betul sesuai dengan syariah Islam. Ketika seorang muslim menyadari itu maka dia akan menjauhi bank konvensional dan mencari bank syariah. Contoh lain tentang pemakaian busana muslimah. Ketika seorang muslimah menyadari harus menutup aurat dengan busana muslimah, maka ia akan berusaha mendapatkan dan memakainya. Dari dua contoh tersebut dapat dipahami bahwa

dasarnya adalah kesadaran. Dari kesadaran itulah maka umat Islam akan memiliki kekuatan. Umat dalam pengertian ini berarti masyarakat luas maupun umat yang memiliki pengaruh dan kekuatan di tengah-tengah masyarakat. kesadaran itu kemudian mempengaruhi untuk melakukan perubahan kearah Islam. Dari sanalah sebenarnya perubahan itu akan terjadi. Memang jauh dari pemahaman orang yang menganggap perubahan itu selalu menggunakan rute yang lazim. Yang dimaksud rute yang lazim dalam bidang politik misalnya melalui pemilu, masuk parlemen dan merubah undang-undang atau duduk sebagai eksekutif yang memiliki tugas memimpin. Secara praktis menurut Hizbut Tahrir, mereka tidak pernah melahirkan suatu perubahan yang mendasar. Angka pada tabel di bawah juga menunjukkan bahwa kategori jawaban Hizbut Tahrir sangat berperan dalm bidang budaya berjumlah 13 (10,4 %) dan jawaban berperan berjumlah 23 (18,4 %) orang responden dan kurang berperan 32 (25.6 %).

Tabel 18. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Bidang Budaya

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berperan	13	10,4 %
2.	Berperan	23	18,4 %
3.	Kurang berperan	32	25,6 %
4.	Tidak berperan	57	45,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

B. Peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan

di Kota Makassar

Tidak diketahui secara pasti mengenai masuknya Hizbut Tahrir di Indonesia, namun diperkirakan sekitar tahun 1982/1983. Hadir bersamaan dengan gerakan-gerakan Islam lain seperti Ikhwanul Muslimin. Di tahun 80-an, muncul fenomena maraknya kajian-kajian keagamaan di kampus-kampus, sehingga memunculkan gerakan-gerakan, antara lain seperti gerakan jilbab, *usrah* dan *tarbiyah*. Fenomena ini muncul seiring dengan pengaruh global yang tengah memasuki dunia modern. Meskipun Hizbut Tahrir

telah ada sejak era tahun 80-an, tetapi aktivitasnya sebagai gerakan belum terlacak, karena para aktivisnya tidak menunjukkan kegiatan secara terang-terangan. Hal tersebut dilakukan demi untuk menghindari tekanan refresif dari pemerintah orde baru saat itu. Setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, dan kehidupan demokrasi telah dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, maka Hizbut Tahrir telah menampakkan kegiatan-kegiatannya dan mulai merekrut anggota secara terang-terangan.

Kemunculan Hizbut Tahrir di Indonesia bermula dari ustadz Mama Abdullah bin Nuh, pengelola pondok pesantren al-Ghazali Bogor yang juga staf pengajar di fakultas sastra Universitas Indonesia. Ia mengajak seorang aktivis Hizbut Tahrir Australia yaitu Abdurrarahman al-Baghdady untuk menetap di Bogor, yang selanjutnya berinteraksi dengan para aktivis Islam di mesjid al-Ghifari, Institut Pertanian Bogor (IPB). Kemunculannya ke publik secara besar-besaran adalah ketika pertengahan tahun 2002 dengan diadakannya sebuah konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyah yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta.

Hizbut Tahrir adalah suatu fenomena politik yang Indonesia yang unik. Dari seratus lebih parpol yang mewarnai pentas nasional sejak reformasi 1998, Hizbut Tahrir barangkali adalah yang tertua. Dari awal menyebut dirinya sebagai partai politik, bukan hanya gerakan dakwah. Sifatnya yang kosmopolit dan internasional, membuat Hizbut Tahrir berada di mana-mana. Di Indonesia Hizbut Tahrir eksis dengan legalitas sebagai organisasi massa dengan nama “Hizbut Tahrir Indonesia”. Namun aktivitas politik Hizbut Tahrir adalah *high politics* atau *smart politics* artinya Hizbut Tahrir mendidik masyarakat agar sadar akan hak dan kewajiban Islaminya, sehingga mereka bisa mengawasi penguasa agar pemerintahan sesuai dengan Islam. Bagi Hizbut Tahrir sudah cukup bahwa masyarakat bersama penguasanya berjalan secara Islami, tanpa harus berkuasa sendiri.

Hizbut Tahrir masuk ke kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2002, yang diawali dengan diutusnya beberapa aktivis muslim kampus, terutama aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin, sebagaimana data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa :

“Awal masuknya Hizbut Tahrir di Makassar adalah ketika beberapa aktivis kampus pergi ke Malang untuk belajar Islam dan Bahasa Arab, satu diantaranya

adalah Hasanuddin Rasyid yang kini menjabat sebagai DPD Hizbut Tahrir Propinsi Sulawesi Selatan. Ketika di Malang ternyata para aktivis tersebut ternyata diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir dan setelah mereka kembali ke Makassar, mereka mensosialisasikan kepada mahasiswa yang lain dan masyarakat umum. Setelah beberapa tahun berjalan, maka dibentuklah Dewan Pimpinan Wilayah Hizbut Tahrir Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Zamroni Ahamad.”(Hasil wawancara dengan HW, aktivis Hizbut Tahrir).

Awalnya Hizbut Tahrir ditolak dan di anggap ide-idenya *utopis* (tidak mungkin), tapi kemudian mulai mendapat tanggapan positif dari masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan kota Makassar pada khususnya yang memang terkenal religius atau menyukai hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir di kota Makassar ternyata mempunyai basis di perguruan tinggi negeri dan swasta dan terbanyak di Universitas Hasanuddin. Aktivis gerakan ini biasanya tampil dengan sopan, teratur, sering memakai pakaian putih atau hitam ketika mereka melakukan aksi demonstrasi (*masirah*) memprotes kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat terutama umat Islam. Aktivitas Masirah ini juga merespon situasi dunia Islam seperti Palestina, Afganistan, Irak, Libya dan lain-lain. Walaupun salah satu kegiatan Hizbut Tahrir adalah melakukan aksi tetapi tidak pernah mengarah pada tindakan anarkhi, sebagaimana yang dikatakan oleh MDR bahwa :

“*Masirah* atau demonstrasi menurut Hizbut Tahrir hanyalah merupakan *ibda'ur ra'yi* yaitu aktivitas menyampaikan pendapat atau tuntutan tanpa disertai aktivitas kekerasan. Respon yang dilakukan dalam *masirah* berbeda-beda tergantung pada isu yang sedang diusung, tetapi yang jelas bahwa dalam setiap *masirah* terdapat simbol-simbol bendera warna hitam, serta spanduk-spanduk bertuliskan “Khilafah adalah solusi”, Khilafah adalah model terbaik”, Tegakkan Syariah dan Khilafah.”(Hasil wawancara dengan MDR, aktivis Hizbut Tahrir).

Hizbut Tahrir di kota Makassar juga melakukan usaha-usaha sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam bingkai negara

khilafah. Tanpa negara, mustahil untuk menegakkan syariah Islam. Maka yang pertamanya harus diusahakan adalah terbentuknya negara (Daulah Khilafah Islamiyah). Di samping pemahaman tentang pentingnya pembentukan khilafah, yang tak kalah pentingnya adalah pemberian gambaran tentang kondisi umat Islam saat ini, yang menurut Hizbut Tahrir sedang mengalami kemunduran atau keterpurukan. Dengan pemberian pemahaman seperti itu maka diharapkan masyarakat dapat melakukan perubahan dalam diri maupun masyarakat secara luas. Aktivitas sosialisasi dan interaksi yang dilakukan oleh kader-kader Hizbut Tahrir biasanya melalui ceramah di Majelis Taklim atau kelompok-kelompok keagamaan dalam acara pengajian atau acara-acara keagamaan lainnya. Data tentang sosialisasi yang dilakukan Hizbut Tahrir di kota Makassar dapat diketahui dari hasil kuesioner pada tabel 5 di uraian sebelumnya.

Meskipun Hizbut Tahrir memperjuangkan perubahan masyarakat, namun tidak di *drop* dari atas, ataupun di dongkrak dari bawah. Masyarakat bukan sekedar himpunan individu, dan diikat pemikiran, perasaan dan peraturan yang sama namun individu-individu yang berinteraksi dan diikat pemikiran yang sama, perasaan yang sama, peraturan yang sama. Karena itu Hizbut Tahrir mendidik secara individual kadernya, seraya secara bersama-sama melakukan interaksi ke masyarakat untuk mengubah opini umumnya. Bila kader-kadernya itu memiliki *power*, sementara opini umum juga sudah kondusif untuk Islam, maka perubahan sistem akan berjalan mulus. Selanjutnya sistem baru yang dijalani Islam itu akan memacu Islamisasi lagi, tanpa harus membuat semua orang menjadi kader. Uraian ini di dukung oleh data wawancara yang dikemukakan oleh seorang aktivis Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa :

“Untuk saat ini Hizbut Tahrir tengah berupaya untuk melakukan interaksi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kondisi kehidupan yang dialami masyarakat Islam saat ini, yang disebabkan oleh karena sistem yang mengatur kehidupan tersebut bukanlah aturan yang berdasarkan Islam. Hari Mukti salah seorang mantan artis yang kemudian menjadi aktivis Hizbut mengatakan bahwa kita ingin merubah masyarakat dengan membersihkan yang kotor-kotor tanpa harus kita sendiri yang berkotor-kotor” (Hasil wawancara dengan HW, aktivis Hizbut Tahrir)

Model masyarakat yang dicita-citakan Hizbut Tahrir adalah masyarakat Islam yang di pimpin oleh seorang khalifah. Hizbut Tahrir memposisikan teks suci untuk membangun masyarakat yang ideal yang dihubungkan dengan konteks sosial. Hati, pikiran dan perilaku masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, politik dan budaya semuanya telah memiliki basis konsep ajaran dalam agama Islam. Tindakan orang yang beragama peduli terhadap kondisi lingkungannya dan hal ini menentukan kadar keimanan seseorang. Bila terjadi kemungkaran, umat muslim harus melakukan tindakan yaitu cegahlah dengan tangan, lisan dan jika tak bisa maka terakhir dengan hati, dan itulah kadar iman yang paling lemah.

Sebagai organisasi transnasional yang menyebar ke berbagai wilayah Islam, tentu saja Hizbut Tahrir berhadapan dengan kondisi-kondisi global, regional dan lokal. Keadaan itu membawa pengaruh dan adaptasi terhadap beberapa pandangan. Dalam kasus global Hizbut Tahrir melihat adanya hegemoni struktur budaya, politik dan ekonomi yang menindas kaum muslim saat ini. Seperti kasus yang bergejolak di beberapa negara di Timur Tengah, yang terjadi adalah penguasa di tolak oleh rakyatnya, karena mereka tidak berpihak pada kepentingan rakyatnya tapi berpihak kepada kepentingan Amerika dan Eropa, dalam rangka penguasaan sumber daya minyak, mineral dan nuklir. Motif orang kapitalis adalah mendapatkan sumber daya alam yang murah dari negara-negara yang bisa di jajah dengan halus.

Sedangkan dalam kasus nasional saat ini Hizbut Tahrir melihat adanya hegemoni struktur budaya, politik dan ekonomi, yaitu sistem ekonomi liberal yang ada di Indonesia dan sistem politik demokrasi liberal, tetapi masyarakat tidak melihat hal tersebut karena kejahiliyahan, karena itu Hizbut Tahrir bergerak dalam bidang pencerahan publik. Beberapa isu lokal juga menjadi perhatian Hizbut Tahrir, seperti tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Menurut Hizbut Tahrir bahwa sistem pemilihan yang dilakukan untuk memilih pemimpin lokal adalah salah satu produk politik sekuler dan merupakan sistem yang timbul dari rasa fanatisme kesukuan atau kedaerahan. Padahal fanatisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sangat tampak jelas kekisruhan yang

terjadi dalam berbagai proses pilkada, seperti terpilihnya orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas di mata umat, oleh karena di pilih oleh mayoritas masyarakat.

Strategi aksi yang dilakukan untuk membebaskan dari hegemoni struktur tersebut adalah integratif dilakukan secara serempak baik global, nasional maupun lokal. Sekarang tahap yang dilakukan adalah tahap penyadaran, karena untuk mengambil alih kekuasaan harus dengan kekuatan real dari masyarakat yang motifnya benar, bukan hanya motif sekedar mendapatkan makan dan kekuasaan. Rumusan strategi untuk mencapai cita-cita pembebasan tersebut adalah mafahim artinya membentuk pemahaman yang benar pada masyarakat, maqayis artinya menanamkan di masyarakat tentang tolok ukur amal yaitu Al-Qur'an, Hadis dan Sunnah, dan qanaah artinya menanamkan ketaatan pada masyarakat, orang akan merasa mencapai kebahagiaannya kalau bisa taat kepada Allah SWT.

Sebagai gerakan yang memperjuangkan perubahan yang mendasar, Hizbut Tahrir dapat juga disebut sebagai gerakan yang radikal (*radix* adalah akar, mendasar). Namun Hizbut Tahrir jauh dari kesan eksklusif. Mereka berbaur di masyarakat dan tidak berpretensi membentuk perkampungan sendiri. Maka aktivis HT hanya bisa dikenali dari pikirannya, tidak dari lahiriahnya. Kalaupun aktivis perempuan HT berkerudung atau berjilbab, itu bukan karena Hizbut Tahrir nya tapi karena memang kewajiban agama dalam Islam. Bahkan Hizbut Tahrir tidak memiliki bendera. Bendera hitam bertuliskan kalimat tahlil putih yang sering dibawanya adalah bendera Islam, dan boleh dibawa oleh setiap muslim di bumi ini. Meski HT memperjuangkan syariat Islam namun memilih nama universal "Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan), tanpa label Islam, karena ini mubah. Namun pembebasan itu bukanlah liberalism (bebas dari batasan apapun kecuali yang bermanfaat baginya), melainkan pembebasan dari penghambaan pada sesama manusia menjadi penghambaan kepada Allah SWT.

Untuk mengetahui apakah Hizbut Tahrir melakukan perubahan di kota Makassar, dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Distribusi Pendapat Responden Tentang Perubahan yang Dilakukan Oleh Hizbut Tahrir di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Melakukan	16	12,8 %
2.	Melakukan	45	36 %
3.	Kurang Melakukan	36	28,8 %
4.	Tidak Melakukan	28	22,4 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memilih jawaban sangat melakukan berjumlah 16 (12,8), Melakukan 45 (36 %), kurang melakukan 36 (28,8 %) dan 28 (22,4 %) orang responden menjawab tidak melakukan. Bila kita cermati angka-angka pada tabel di atas maka kita akan memahami bahwa Hizbut Tahrir telah melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah perubahan fundamental yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yaitu perubahan sistem, dari sistem yang tidak sesuai dengan syariah Islam menjadi sistem yang sesuai dengan syariah Islam. Sistem yang mengatur masyarakat sekarang adalah sistem yang tidak memihak kepada rakyat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak. Hizbut Tahrir berupaya memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang hakikat diri mereka dan kebutuhan serta kewajiban mereka terhadap penciptanya. Sehingga menurut salah seorang aktivis Hizbut Tahrir dalam salah satu ceramahnya mengatakan bahwa :

“Tidak penting bagi manusia membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah upaya Hizbut Tahrir mulai mendapat perhatian umat karena sebenarnya Hizbut Tahrir hanya membawa Islam dan berupaya mengembalikan kehidupan Islam.”(hasil wawancara dengan UM, aktivis Hizbut Tahrir)

Secara umum dapat dikatakan bahwa Hizbut Tahrir telah melakukan perubahan didalam masyarakat. bagaimana peran Hizbut Tahrir dalam perubahan sosial keagamaan di Kota Makassar, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 20. Distribusi Pendapat Responden Tentang Peran Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sebagai Motivator	71	56,8 %
2.	Sebagai Perencana	13	10,4 %
3.	Sebagai Pelaksana	24	19,2 %
4.	Sebagai Pengontrol	17	13,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Salah satu peran yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah sebagai motivator (71 atau 56,8 % orang responden) atau pemberi motivasi kepada masyarakat agar melakukan perubahan. Salah satu bentuknya adalah melalui proses penyadaran atau pembentukan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Menyadarkan masyarakat tentang kehidupan mereka saat ini yang diatur oleh hukum yang tidak bersumber dari Islam. Perubahan yang dapat kita lihat umat islam sudah mulai sadar dan mulai mau belajar Islam. Selanjutnya secara bertahap mulai berusaha melaksanakan syariah Islam mulai dari diri mereka hingga ke lingkungan sekitarnya yang bisa mereka jangkau. Peran selanjutnya adalah sebagai perencana sebanyak 13 (10,4 %) responden memilih jawaban ini. Sebagai perencana Hizbut Tahrir berpedoman kepada aturan-aturan organisasinya yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada tindakan yang bertentangan dengan keduanya. Karena itu, Hizbut Tahrir dalam melakukan aksinya menempuh cara-cara damai, mencontoh model perjuangan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang terbaik.

Selanjutnya responden yang menjawab sebagai pelaksana sejumlah 24 (19,2 %) orang responden. Sebagai pelaksana perubahan jelas Hizbut Tahrir melakukannya sendiri dengan beberapa cara antara lain menurunkan kader-kadernya ke tengah masyarakat sebagai motivator perubahan atau sebagai penceramah yang melakukan dakwah dan pemahaman di masyarakat. Ketika masyarakat sudah paham maka secara alami mereka akan berusaha memahamkan masyarakat yang lain sehingga Islam sebagai hukum dan solusi bagi seluruh persoalan menjadi opini umum, kemudian para penguasa yang juga sudah diberi pemahaman akan menyambut keinginan masyarakat dengan

mewujudkannya dalam sistem yang diridhai oleh Allah SWT yaitu sistem Islam yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Kategori jawaban terakhir adalah sebagai pengontrol (*social control*). Sebanyak 17 (13,6 %) responden memilih jawaban ini. Hizbut Tahrir mengontrol pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, apakah sudah berjalan sesuai dengan syariah Islam. Bila tidak, maka Hizbut Tahrir akan melakukan aksi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah, seminar, diskusi dan *masirah* (demonstrasi). Aksi demonstrasi (*masirah*) adalah salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir terhadap pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bertentangan atau tidak memihak kepada rakyat, misalnya tentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM), penyerahan pengelolaan sumber daya alam Indonesia kepada pihak asing, masalah korupsi para pejabat dan lain sebagainya.

Kemudian untuk melihat aspek perubahan keagamaan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Distribusi Pendapat Responden Tentang Aspek Perubahan yang dilakukan Oleh Hizbut Tahrir di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pola Pikir Masyarakat	61	48,8 %
2.	Pola Perilaku Masyarakat	26	20,8 %
3.	Interaksi Sosial Masyarakat	11	8,8 %
4.	Struktur Sosial Masyarakat	10	8 %
5.	Sistem Kehidupan Umat Islam	17	13,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perubahan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah perubahan pola pikir masyarakat (61 atau 48,8 %) sesuai dengan pemikiran Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Aspek selanjutnya adalah perubahan pola perilaku masyarakat, sebanyak 26 (20,8 %) orang responden menjawab bahwa Hizbut Tahrir telah melakukan perubahan dalam aspek ini. Perubahan perilaku secara umum dan kepada ibu-ibu secara khusus, misalnya dalam tata cara berbusana/berpakaian sesuai dengan syariah Islam (menutup aurat secara syar'i) dengan memakai jilbab baju gamis

(terusan) dan kerudung yang menutup dada (menyembunyikan perhiasan yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan muhrim). Kategori jawaban berikutnya adalah interaksi sosial masyarakat (11 atau 8,8 %) orang responden memilih jawaban ini. Menurut Hizbut Tahrir interaksi yang terjadi di masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semua bentuk hubungan (interaksi) yang ada saat ini, harus diubah bila bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian responden yang memilih struktur sosial berjumlah 10 (8 %) orang responden dan yang memilih jawaban sistem kehidupan umat Islam berjumlah 17 (13,6 %). Secara umum arah perubahan yang ditargetkan oleh Hizbut Tahrir adalah terbentuknya khilafah Islamiyah. Perubahan dalam aspek pendidikan, politik, ekonomi dan lain-lain semuanya tergantung pada sistem atau sistem yang harus dirubah. Sudah seperti apa keberhasilan yang telah dicapai oleh Hizbut Tahrir dalam melakukan perubahan sosial keagamaan di kota Makassar, dapat dicermati dari penyajian data berikut :

Tabel 22. Distribusi Pendapat Responden Tentang Keberhasilan Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Berhasil	9	7,2 %
2.	Berhasil	35	28 %
3.	Kurang Berhasil	56	44,8 %
4.	Tidak Berhasil	25	20 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Sebanyak 9 (7,2 %) orang responden memilih jawaban sangat berhasil, 35 (28 %) menjawab berhasil, 56 (44,8 %) menjawab kurang berhasil dan 25 (20 %) orang responden menjawab tidak berhasil. Bila dilakukan perbandingan, maka terlihat bahwa mayoritas responden menjawab bahwa Hizbut Tahrir kurang berhasil melakukan perubahan. Tentu saja jawaban ini muncul dilatarbelakangi oleh pemikiran atau alasan yang berbeda-beda di antara responden. Pada saat wawancara dengan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir mengatakan bahwa :

“Upaya-upaya sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat cukup berhasil dengan indikator bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir mendapat

dukungan. Mayoritas masyarakat menyambut baik ide-ide yang dilontarkan oleh Hizbut Tahrir ketika kader/aktivisnya terjun ke masyarakat berdakwah, juga ketika melakukan kegiatan-kegiatan selalu dipadati oleh peserta. Ini bisa dilihat ketika melakukan konferensi tokoh-tokoh agama SeSulawesi Selatan di Unhas bulan Juli 2012 yang lalu, yang dihadiri oleh kurang lebih 3.000 orang, yang mendukung ide Hizbut Tahrir untuk berdirinya khilafah”(Hasil Wawancara dengan HW, aktivis HT).

Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran. Tolok ukur yang digunakan adalah tolok ukur subyektif dan obyektif. Tolok ukur subyektif berarti pengemban dakwahnya saja yang bisa merasakan karena mereka memang berinteraksi dengan umat. Sehingga bisa mengamati bahwa kesadaran itu telah muncul. Sedangkan tolok ukur obyektif dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merespon kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. kalau mereka meresponnya dengan cara pandangan Islam maka ia akan menolak pada sesuatu yang mungkar dan melakukan sesuatu yang ma’ruf. Menolak segala Sesutu yang bersifat tidak Islami seperti sekularistik dan menuntut perubahan-perubahan kearah Islam dan tidak hanya sekedar simbolisasi Islam. Serta mudahnya masyarakat digerakkan untuk merespon masalah-masalah tertentu dengan sudut pandang Islam.

Hasil penelitian berikut ini memberikan gambaran dari jawaban responden tentang perhatian masyarakat terhadap khilafah sebagai model terbaik untuk perubahan masyarakat.

Tabel 23. Distribusi Pendapat Responden Tentang Khilafah Sebagai Model Terbaik Untuk Perubahan Masyarakat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Memperhatikan	28	22,4 %
2.	Ada Perhatian	28	22,4 %
3.	Kurang Perhatian	39	31,2 %
4.	Tidak Ada perhatian	30	24 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Dari data diatas terlihat bahwa 28 (22,4 %) orang responden menjawab sangat memperhatikan, 28 (22,4 %), kategori jawaban kurang perhatian sebanyak 39 (31,2 %) dan kategori terakhir yaitu tidak ada perhatian sejumlah 30 (24 %) orang responden. Bila diamati maka jawaban kurang perhatian adalah jawaban yang mayoritas. Hal tersebut menjadi tantangan untuk Hizbut Tahrir untuk bekerja lebih keras lagi untuk melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih intensif dan lebih luas lagi. Sampai ke elemen-elemen terbawah atau akar rumput di masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki perhatian dan persepsi yang sama bahwa khilafah adalah model terbaik dan Islam adalah solusi yang terbaik untuk merubah keadaan masyarakat saat ini.

Tabel 24. Distribusi Pendapat Responden Tentang Pengaruh Sosialisasi Khilafah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Berpengaruh	22	17,6 %
2.	Berpengaruh	26	20,8 %
3.	Kurang Berpengaruh	50	40 %
4.	Tidak Berpengaruh	27	21,6 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Tabel 23 memberikan pemahaman tentang pengaruh sosialisasi khilafah di masyarakat. 22 (17,6 %) menjawab sangat berpengaruh, 26 (20,8 %) menjawab berpengaruh, dan kebanyakan responden menjawab kurang berpengaruh, yaitu sejumlah 50 (40 %) orang responden. Kemudian jawaban tidak berpengaruh sejumlah 27 (21,6 %) orang responden. Dari jawaban responden tersebut, realitasnya adalah mayoritas masyarakat di kota Makassar belum merasakan pengaruh sosialisasi khilafah. Bagi Hizbut Tahrir harus menjadi motivasi untuk berbuat lebih banyak lagi. Memang butuh waktu yang lama, tetapi usaha itu akan terus-menerus dilakukan sampai kemudian mencapai puncaknya dan masyarakat menyadari bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah sekarang tidak sesuai dengan syariah Islam. Kemudian bagaimana kepedulian umat Islam terhadap upaya perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir di kota Makassar, terdeskripsi pada tabel berikut :

Tabel 25. Distribusi Pendapat Responden Tentang Kepedulian Umat Islam Terhadap Upaya Perubahan Yang Dilakukan Hizbut Tahrir di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Peduli	17	13,6 %
2.	Peduli	29	23,2 %
3.	Kurang Peduli	46	36,8 %
4.	Tidak peduli	33	26,4 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Kepedulian masyarakat terhadap upaya perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir masih rendah yaitu 46 (36,8 %) menjawab kurang peduli dan 33 (26,4 %) menjawab tidak peduli. Penyebab dari ketidakpedulian ini bermacam-macam. Faktor pertama adalah mayoritas masyarakat (lebih banyak) belum mengenal Hizbut Tahrir, kedua adalah masyarakat sudah mengenal tapi tidak peduli, bahkan ada yang sama sekali tidak mau tahu. Hasil penelitian pada tabel berikut menunjukkan dukungan masyarakat terhadap upaya perubahan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir.

Tabel 25. Distribusi Pendapat Responden Tentang Dukungan Masyarakat Terhadap Perubahan Menuju Khilafah di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mendukung	15	12 %
2.	Mendukung	46	36,8 %
3.	Kurang Mendukung	33	26,4 %
4.	Tidak Mendukung	31	24,8 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

Di dalam upaya melakukan perubahan memang sangat dibutuhkan dukungan masyarakat. Pada dasarnya masyarakat kota Makassar mendukung untuk memberlakukan syariah Islam, walaupun bentuk dukungan itu berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan “syariah Islam yes dan negara Islam no” yang berarti bahwa kalau syariah Islam hanya berlaku untuk umat Islam saja, sementara kalau negara Islam berarti semua orang yang

berada di dalam negara itu, wajib tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku. Data pada tabel diatas menjadi bukti pernyataan tersebut. Sebanyak 46 (36,8 %) orang responden menjawab mendukung dan 15 (12 %) menjawab sangat mendukung, dan hanya 33 (26,4 %) menjawab kurang mendukung serta 31 (24,8 %) yang menjawab tidak mendukung. bila dihubungkan dengan tabel sebelumnya (tabel 24) berarti bahwa dukungan yang diberikan sebagian dalam bentuk dukungan yang kurang atau tidak peduli. Tabel terakhir pada bagian ini, tentang kesiapan umat Islam melakukan perubahan menjadi sistem khilafah. Jika dicermati pada data tersebut terlihat masyarakat kurang siap untuk berubah. Ini dibuktikan dari jawaban kurang siap sejumlah 43 (34,4 %) di tambah dengan jawaban tidak siap sejumlah 30 (24 %) sehingga bila dijumlah adalah 73 (60 %). Memang butuh waktu untuk mempersiapkan umat Islam untuk merubah sistem yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, karena itu dibutuhkan kesatuan dalam bahasa dan tindakan. Sehingga umat Islam tidak terkotak-kotak ke dalam beberapa segmen yang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Bahkan yang lebih parah lagi ketika umat Islam saling mencari kelemahan dan menyalahkan sesamanya muslim, maka kemudian yang mendapat keuntungan adalah orang-orang di luar Islam.

Tabel 26. Distribusi Pendapat Responden Tentang Kesiapan Umat Islam Melakukan Perubahan Menjadi Sistem Khilafah di Kota Makassar

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Siap	12	9,6 %
2.	Siap	40	32 %
3.	Kurang Siap	43	34,4 %
4.	Tidak Siap	30	24 %
	Jumlah	125	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data primer 2012

C. Tantangan yang dihadapi Hizbut Tahrir Dalam Perubahan Sosial Keagamaan di Kota Makassar

Setiap perjuangan pasti menghadapi tantangan terutama dari orang-orang yang tidak paham tujuan perjuangan itu. Ada dua tantangan yang dihadapi oleh Hizbut Tahrir yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal adalah kaum muslim yang

tidak paham tentang Islam dan orang-orang yang merasa kepentingannya (harta maupun kedudukan) terancam jika Islam diterapkan karena Islam mengharamkan korupsi. Tantangan eksternal datang dari orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Mereka tidak rela melihat kejayaan Islam jika bersatu di bawah naungan khilafah. Sehingga mereka berusaha memecah belah kaum muslimin, misalnya dengan memilah kaum muslimin ada yang muslim moderat, muslim radikal/fundamental, muslim tradisional, garis keras dan lain-lain. Padahal Islam cuma satu. Orang-orang kafir menyadari betul kekuatan Islam jika bersatu, sehingga mereka berusaha menguasai pemimpin di negeri-negeri muslim terutama ekonominya sehingga dengan mudah dapat ditundukkan sesuai dengan keinginannya. Jadilah pemimpin itu boneka orang kafir dan menjadi penguasa kaum muslimin di setiap negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam. Di samping itu, mereka berusaha agar orang Islam di sekap (berdiam) di mesjid dan syariah Islam tidak boleh diterapkan dalam kehidupan secara menyeluruh.

Pada uraian-uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa arah perubahan yang diinginkan oleh Hizbut Tahrir adalah terbentuknya Daulah Khilafah Islamiyah. Persoalan kapan itu akan terwujud, sulit dijawab dengan pasti karena terkait dengan soal waktu, dan terkait dengan perubahan sosial. Kalau perubahan fisik, misalnya membangun gedung atau jalan bisa diperkirakan kapan selesainya. Berbicara tentang perubahan sosial juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal artinya lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa menambah atau mengurangi kesadaran (indikator kecepatan perubahan). Sedangkan faktor internal adalah sejauh apa gerakan Islam, khususnya Hizbut Tahrir bekerja penuh memunculkan kesadaran itu. Perubahan akan cepat terjadi ketika Hizbut Tahrir betul-betul bekerja dan didukung oleh seluruh aktivis dan simpatisannya untuk membangkitkan umat untuk memunculkan kesadaran Islam. Ditambah lagi, lahir kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang menambah kesadaran itu. Misalnya, sekarang ini terlihat kehancuran sistem ekonomi kapitalis atau krisis keuangan global. Ini memberikan efek positif bagi munculnya kesadaran di tengah-tengah umat. Tetapi persoalan waktu belum bisa dijawab. Hanya saja kita bisa merasakan tuntutan-tuntutan untuk menegakkan syariah Islam semakin hari semakin nyaring terdengar, terbukti dari survey-survey yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga Islam, yang independen maupun sekuler. Ini menunjukkan adanya kenaikan kesadaran. Begitu juga dengan istilah khilafah semakin populer.

Hizbut tahrir dalam gerakannya selama ini telah memperoleh banyak dukungan. Dulu, pada awalnya hanya berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Kini sudah berkembang di lebih dari 30 provinsi, lebih dari 300 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Kalau mau menggunakan tolak ukur ketersebaran parpol, maka Hizbut Tahrir juga sudah tersebar secara nasional. Hizbut Tahrir bisa melakukan aksi damai dengan jumlah massa yang besar, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan mendapat respon. Keyakinan bahwa syariah Islam dan khilafah adalah sesuatu yang benar, mendorong mereka untuk melakukan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa perjuangan yang dilakukan murni untuk merubah dan memperbaiki masyarakat, tanpa tendensi politik praktis. Karena memang Hizbut Tahrir dikenal sebagai parpol yang tidak pernah memperebutkan kursi di parlemen atau pemerintahan.

Mengalami tantangan dalam suatu perjuangan itu sesuatu yang alamiah, namun jangan karena adanya tantangan menyurutkan langkah ke belakang. Sebab faktanya perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Bagaimana mau dikatakan sisa-sia kalau umat menyadari kewajibannya sebagai muslim, dan mau melakukan perubahan. Bukankah esensi dakwah seperti itu. Apa yang mau dikatakan kalau ternyata orang mengaku berdakwah tetapi kemudian tidak menambah pemahaman kepada orang yang mendengarnya, kecuali bahwa pragmatism politik yang menjadi tujuannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari proses penelitian dan analisa serta pembahasannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Arah perubahan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah merubah sistem yang berlaku saat ini, menjadi sistem yang berdasarkan pada syariah Islam dalam Daulah Khilafah Islamiyah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Hizbut Tahrir melakukan sosialisai dan interaksi dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Banyak hal yang telah diupayakan oleh Hizbut Tahrir, namun yang paling mendasar adalah berusaha merubah pemikiran masyarakat menjadi pemikiran yang Islami, proses ini dilakukan melalui penyadaran bahwa kehidupan umat Islam saat ini tidak diatur oleh syariah Islam. Akibatnya adalah umat berada dalam kondisi yang makin terpuruk. Perubahan masyarakat dalam berbagai aspek, sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan budaya semuanya tergantung pada sistem atau sistem yang harus berupaya. Bagaimana pun hasilnya Hizbut Tahrir telah melakukan perannya sebagai *agent of change*.
2. Dalam melakukan perubahan sosial keagamaan di kota Makassar, Hizbut Tahrir mengalami tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang datang dari umat Islam sendiri yang tidak mau belajar atau mendalami agama. Sehingga tidak tahu membedakan sesuatu yang benar dan yang salah. Di samping itu, ada pula orang dari kalangan intern umat Islam yang menantang pemberlakuan syariah Islam karena takut mengganggu kepentingan-kepentingannya, yang notabene kepentingan tersebut dilarang dalam syariah Islam., seperti korupsi dan membungakan uang (riba). Tantangan binternal datang dari orang-orang di luar Islam (dalam terminologi HT, di sebut orang kafir) ayng memusuhi Islam dan tidak mau melihat kejayaan Islam yang semakin kuat karena bersatu di bawah naungan *Daulah Khilafah Islamiyah*.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan dukungan dan keseriusan umat Islam dalam melakukan upaya-upaya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan pada syariah Islam.
2. Agar supaya apa yang diharapkan oleh Hizbut Tahrir untuk merubah sistem yang berlaku di dalam masyarakat, maka Hizbut Tahrir harus melakukan sosialisasi dan interaksi kepada semua elemen masyarakat mulai dari level teratas sampai yang terendah. Karena terkesan selama ini, bahwa Hizbut Tahrir didominasi oleh kaum terpelajar dan garapannya adalah kalangan menengah ke atas di dalam masyarakat.
3. Untuk pencapaian tujuan itu juga, maka aktivis Hizbut Tahrir perlu menambah ilmu lebih banyak lagi, baik melalui halaqah yang dilakukan secara intern maupun di luar kalangan sendiri. Sehingga wawasan dan pemahaman tentang bagaimana kalangan di luar mereka dapat bertambah.
4. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan kepustakaan bagi akademisi, peneliti, pemerhati dan siapa saja yang peduli terhadap persoalan perubahan sosial keagamaan di masyarakat. Karena sesungguhnya kehidupan ini akan terus mengalami perubahan, sampai satu titik kulminasi tertentu. Dan hanya Allah SWT yang maha tahu kapan perubahan itu akan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, *Tesis Weber dan Islam di Indonesia*, dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Yogyakarta : Kanisius, 1989
- Abercrombie, Nicholas et.al, *Dictionary Of Sociology*, Harmondsworth : The Penguin, 1986
- Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1991
- Armstrong, Karen, *Sejarah Tuhan*, Bandung: Mizan, 1993
- Abdulsyani, *Sosisologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Bagader, Abubaker, A.(edit), *Islam dan Perspektif Sosiologik*, Surabaya : Amar Press, 1991
- Berger, Peter L, *Langit Suci : Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta : LP3ES, 1991
- Elster, Jon, (Sudarmaji-penerj), *Marxisme : Analisis Kritis*, Jakarta : PT Prestasi Pustaka, 2000
- F.O'Dea, Thomas, *The Sociology Of Religion*, terjemahan Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta : CV Rajawali
- Friedman, George, *The Social Consequenses Of Technical Progress*, dalam *International Social Sciences, Social Implication Of Technical Change*, Unesco Summer
- Farouk, Taji, Suha, *A Fundamental Quest, Hizb al-Tahrir On The Search For The Islam Caliphate*, London, Grey Seal, 1996
- Robertson, Roland, *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1993
- Horikoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : P3M, 1987
- Horton, Paul B, *Sosiologi, Jilid 1*, Terjemahan Aminuddin Ram dkk, Jakarta : Erlangga :1987

- Horton & Hunt, *Sosiologi*, Jilid 2, Jakarta : Erlangga, 1992
- Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalis, cet. Ke-3, Bogor :
Pustaka Tariqul Izzah, 2001
- , *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor :
Pustaka Tariqul Izzah, 2000
- Imam Muhni, Djuretna A, *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim & Henry
Bergson*, Yogyakarta : Kanisius, 1994
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, diterjemahkan oleh Robert
M.Z. Lawang, Jakarta : Gramedia, 1981
- Kartika, Sandra, M. Mahendra, (eds), *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman*,
Jakarta : LSPP, 1999
- K. Nottingham, Elizabeth, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1995
- Lauer, H, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : Gramedia, 1983
- Majid, Nurcholish, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1988
- Mulkhan, A. Munir, *Atas Nama Agama*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998
- Muthahari, Murthada, *Keadilan Ilahi* : Bandung : Mizan, 1992
- M. Siahaan, Hotman, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, Jakarta :
Erlangga : 1996
- Moore, A, Helen, *Sosiologi Wanita*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Nabhani al-, Taqiyuddin, *Mafahimu Hizbut Tahrir*, Jakarta : Pustaka Tariqul Izzah,
t.th
- _____, *al Daulah al Islamiyah*, Beirut : Darul Ummah, 2002
- _____, *Sistem Pemerintahan Islam : Doktrin Sejarah dan Realitas
Empirik*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Bangil : al Izzah, 1997

- Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yaasogama, Jakarta : CV. Rajawali, 1997
- Rahardjo, Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1990
- _____, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung : Mizan, 1993
- Raya Hamilton, Malcolm B, *The Sociology of Religion*, London : Routledge, 1995
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Bina Rena Pariwara, 1996
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Binacipta, 1983
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1997
- Tim penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariat Islam*, t.t : Hizbut Tahrir Indonesia, 2002
- Zallum, Abdul Qadim, *Pemikiran Politik Islam*, terj. Abu Faiz, Bangil : al-Izzah, 2004
- _____, *Demokrasi : Haram Mengambilnya, Menerapkannya dan Mempropagandakannya*, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 1999